

KATA PENGANTAR

Sege nap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Kinerja pemerintahan baik pada level daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pada skala nasional saat ini dihadapkan suatu kondisi yang harus dicapai, yaitu menerapkan paradigma baru pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, tanggap, orientasi terhadap konsensus, partisipatif, efektifitas, efisien dan visi strategis yang kesemuanya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dari setiap unit kerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini akan memuat beberapa aspek, yaitu rencana strategi serta capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja pada tahun 2018 yang digambarkan secara kuantitatif dan kualitatif.

Laporan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Hasil dari penulisan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tentang aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing serta sejauhmana capaian kinerja dapat diwujudkan pada tahun 2018 dan menjadi acuan dimasa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Padang, April 2019
**KEPALA BIRO KERJASAMA,
PEMBANGUNAN DAN RANTAU**

Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19701006 198908 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	3
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sumber Daya Manusia.....	5
E. Isu Strategis Yang Dihadapi.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Sasaran	10
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	15
B. Hasil Pengukuran Kinerja	16
C. Capaian Kinerja Organisasi	17
D. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Permasalahan dan Kendala	67
C. Rekomendasi.....	68

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Atas dasar tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan nyata Good Governance. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. Pada kondisi terkini, evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU

Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan tugas pokok Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu "*menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau*".

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau;
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau; dan
3. Penyelenggaraan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau.

Uraian tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau :

1. Merumuskan dan menetapkan program kerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;
2. Merumuskan pedoman, kebijakan penyelenggaraan Kerjasama Daerah, pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan ranah dan rantau;
3. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap kegiatan Kerjasama Daerah di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota;
4. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengendalian percepatan pembangunan di tingkat provinsi ataupun Kabupaten/Kota;
5. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pemberdayaan ranah dan rantau khususnya dibidang sosial budaya dan ekonomi;
6. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan komunikasi ranah dan rantau khususnya dibidang sosial budaya dan ekonomi;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama ranah dan rantau;
8. Menyelenggarakan analisa dan pertimbangan guna penerbitan rekomendasi bagi pejabat/ASN provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kerjasama ataupun berkunjung ke Luar Negeri;
9. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah;
10. Menyelenggarakan pengendalian percepatan, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis pembangunan Daerah dan Nasional meliputi pembangunan fisik, perekonomian, sosial budaya dan pemerintahan termasuk juga program strategis Kabupaten/Kota;
11. Merumuskan dan menyelenggarakan upaya percepatan pembangunan khususnya untuk program strategis Daerah melalui penyediaan sistem reward dan punish;
12. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Startegis (Renstra), LAKIP, LKPJ dan LPPD Biro;

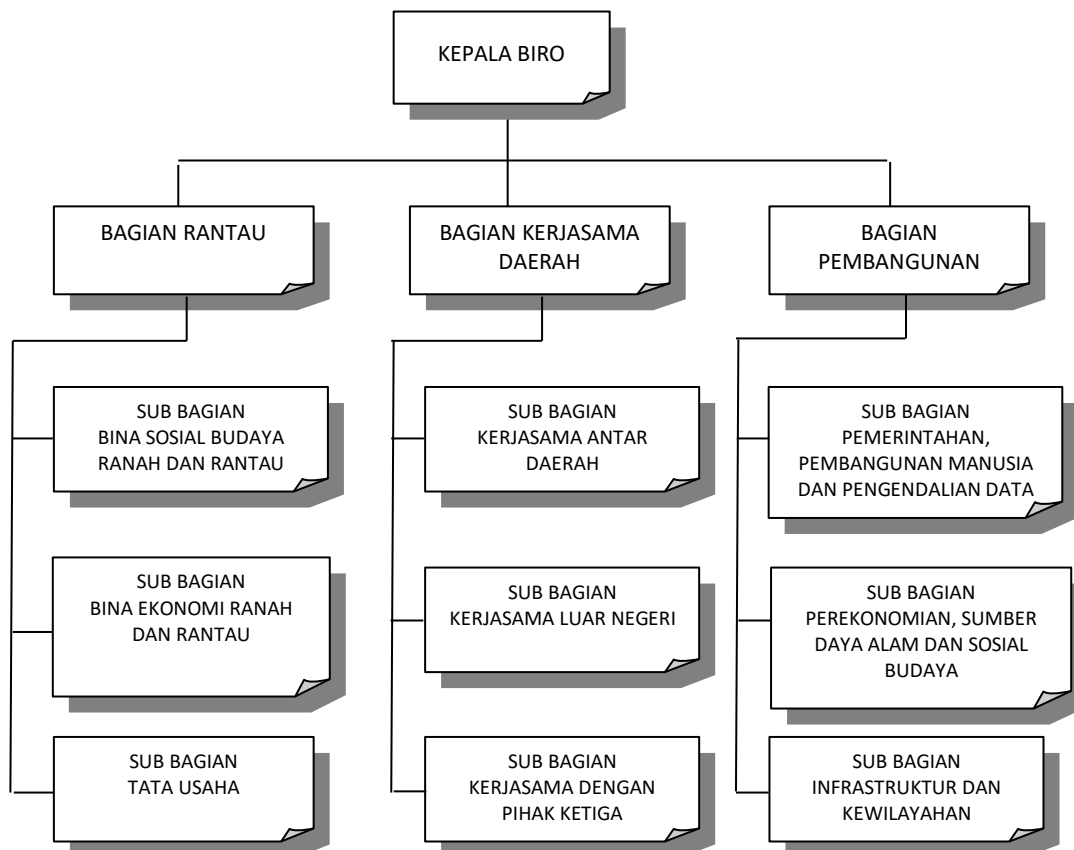
13. Menyelenggarakan tugas penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro;
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
15. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian sebagai berikut :

- 1. Bagian Rantau**, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan program dan kegiatan Rantau. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Rantau terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau;
 - b. Sub Bagian Bina Ekonomi Ranah dan Rantau; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
- 2. Bagian Pembangunan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan, serta perumusan dan penyediaan data dan pelaporan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Pengendalian Data;
 - b. Sub Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya; dan
 - c. Sub Bagian Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 3. Bagian Kerjasama Daerah**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan merumuskan kerjasama daerah, fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah dan pengkajian bahan kebijakan daerah, pemantauan, dan evaluasi kebijakan kerjasama luar daerah dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kerjasama Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Berdasarkan Peraturan Gubernur SUMBAR Nomor 69 Tahun 2017)**



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan kinerja yang berkualitas, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2018, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak 29 orang yang terdiri atas 12 orang struktural, 16 orang fungsional umum, 1 orang fungsional tertentu. Selain itu Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dibantu dengan 1 orang PTT dan 3 orang pegawai sukarela. Pada tabel 1.1. dan grafik 1.1. berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan.

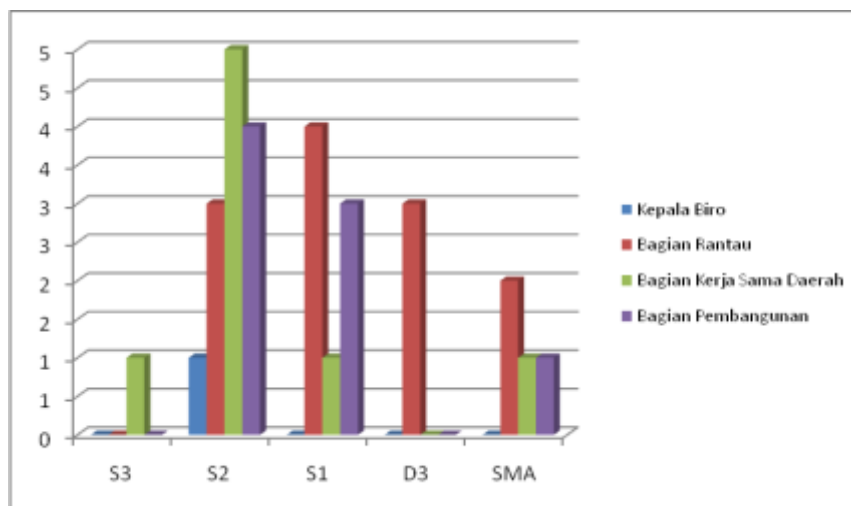
Tabel 1.1. Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2018

No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro		1					
2.	Bagian Rantau		2	4	3	2		
3.	Bagian Kerjasama Daerah	1	6	1		1		
4.	Bagian Pembangunan		4	3		1		
	JUMLAH	1	13	8	3	4	0	29

Sumber : Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dilihat, pada tahun 2018 pegawai di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat 3,45 % tingkat pendidikannya adalah S3 atau sebanyak 1 orang, 44,83 % berpendidikan S2 atau sebanyak 13 orang, 27,59 % berpendidikan S1 atau sebanyak 8 orang, 10,43 % berpendidikan D3 atau sebanyak 3 orang dan 13,79 % berpendidikan SMU sebanyak 4 orang. Pegawai tersebut tersebar di 3 bagian yang ada dilingkungan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 1.1. Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2018



Dari sisi dukungan alokasi anggaran untuk mencapai kinerja pada tahun 2018 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 5.646.962.054,-, dapat terealisasi sebanyak Rp. 5.365.839.979,- (95,02 %) yang merupakan belanja langsung yang terdiri dari :

1. Belanja langsung pokok sebesar Rp. 1.580.541.234,-, realisasi Rp. 1.528.442.548,- (96,70 %).
2. Belanja langsung urusan sebesar Rp. 4.066.420.820,-, realisasi Rp. 3.831.247.431,- (94,21 %).

E. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Isu strategis adalah permasalahan utama yang dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan Renstra Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 -2021, telah diidentifikasi isu strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretaria Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Penanganan daerah perbatasan dengan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah terkait dalam koridor kerjasama yang bersifat wajib;
2. Membuka diri dan mengupayakan secara maksimal untuk mendapatkan tambahan sumberdaya dalam melaksanakan roda pembangunan, penataan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan dengan menggandeng berbagai pihak dalam dan luar negeri, dalam ikatan kerjasama yang saling menguntungkan;
3. Pengendalian percepatan pembangunan secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat mewujudkan target pencapaian realisasi kegiatan dan serapan dana pembangunan secara optimal;
4. Sinergi kebijakan, perencanaan dan aksi nyata antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Sumbar (Ranah) dan masyarakat perantau (Rantau) untuk saling membantu dan memberdayakan satu dan lainnya sehingga terwujud ranah yang sejahtera dan rantau yang berkarakter budaya dibawah koordinasi Pemerintah Daerah baik Provinsi Sumatera Barat termasuk Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar penjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini tetap diperlukan suatu integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, telah dirumuskan perencanaan strategis, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka gambaran masa depan (visi) yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau adalah :

“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

2. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada misi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;
 - b. Meningkatkan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan di Sumatera Barat dan;
 - c. Mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Sebagai implementasi dari pernyataan visi dan misi di atas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun mendatang maka dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategis SKPD, telah dilaksanakan perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan diikuti dengan perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (PK). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Penyelenggaraan Kerjasama Daerah,
Pembangunan dan Rantau dengan Optimal”***

4. Untuk sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Kerjasama Daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengendalian pembangunan;
 - c. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi Rantau dan Rantau.

B. SASARAN

Dari Visi dan Misi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau memiliki sasaran yang akan diwujudkan dalam 5 tahun kedepan pada tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	1. Tingkat partisipasi pelaku pembangunan

Sasaran strategis yang menjadi target capaian Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau adalah meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan, dimana yang menjadi tolak ukur terhadap mencapai sasaran tersebut adalah **Pelaku Pembangunan** yang terdiri dari *OPD yang berkoordinasi dalam melakukan proses kerjasama, perantau yang dibina serta Kabupaten/Kota difasilitasi dalam melakukan kegiatan bersifat mendukung proses kerjasama dan pembangunan.* Sehingga dengan 3 (tiga) pelaku pembangunan tersebut diharapkan dapat diukur tingkat partisipasi pembangunan yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk melakukan sasaran pembangunan terdapat rencana strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Sasaran strategis Biro mengalami beberapa kali perubahan disebabkan karena telah terjadi pergantian nomenklatur sebanyak 3 (tiga) kali. Pada tahun 2016 bernama Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau, Tahun 2017 bernama Biro Kerjasama dan Rantau sedangkan fungsi pembangunan pindah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2018 terjadi pergantian nomenklatur kembali menjadi Biro menjadi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

Pada pembahasan revisi RPJMD yang dilaksanakan pada tahun 2018 Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sudah mengusulkan fungsi pembangunan sebagai rancangan revisi RPJMD, hal ini disebabkan karena fungsi Pembangunan sudah dilaksanakan di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Kondisi sampai pembuatan Laporan Kinerja ini revisi RPJMD masih belum selesai sehingga menjadi kendala menyelesaikan Laporan Kinerja Biro. Sedangkan pada Rencana Strategis Biro 2016-2021 sudah dimasukkan fungsi Pembangunan sehingga mengakibatkan tidak sejalan antara

RPJMD dengan Renstra Biro. Untuk Rencana Kerja Biro sudah mencantumkan program Pembangunan karena tugas dan fungsinya sudah diberikan pimpinan untuk dilaksanakan mulai tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya sasaran strategis tersebut di dukung dengan sasaran strategis dari tingkat dibawahnya (dalam hal ini sasaran strategis dari para eselon 3) yang dapat dibaca pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Pendukung Sasaran Strategis Utama Biro

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)
1.	Meningkatnya fasilitas Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/Pihak Ketiga	1. Jumlah kerjasama antar daerah/luar negeri/pihak ketiga 2. Jumlah kerjasama antar daerah/pihak ketiga/luar negeri yang di monev 3. Jumlah fasilitasi rekomendasi izin ke luar negeri bagi pejabat daerah dan ASN Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya sinergisitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan 2. Rata-rata tertimbang realisasi fisik di atas rata-rata 3. Rata-rata tertimbang realisasi keuangan diatas rata-rata
3.	Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah	1. Tingkat partisipasi perantau dalam pembangunan daerah di Nagari/Desa/Kel Binaan Kerjasama Rantau 2. Kerjasama pemerintah daerah dibidang sosial budaya dan ekonomi

C. PERANJIAN KINERJA

IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka IKU Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau telah ditetapkan secara SMART (*Specific, Measureable, Attainable, Relevance, Time bound*).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*) wajib dituangkan dalam dokumen pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2018 antara kepala SKPD/unit kerja dengan Gubernur Sumatera Barat, seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	1. Tingkat partisipasi pelaku pembangunan	90 %	253,29%	281,43%	Program Kerjasama Pembangunan, Program Pengembangan Data dan Informasi dan Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah

Berdasarkan tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dengan Gubernur Sumatera Barat, bahwa dari satu sasaran yang akan dicapai tersebut terdapat satu indikator kinerja utama yang memiliki target kinerja sebesar 90 %. Sedangkan realisasi target yang terapai sebesar 253,29% dengan jumlah capaian kinerja sebesar 281,43%

Tabel 2.4. Pendukung Sasaran Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	Meningkatnya fasilitas Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/Pihak Ketiga	1. Jumlah kerjasama antar daerah/luar negeri/pihak ketiga 2. Jumlah kerjasama antar daerah/pihak ketiga/luar negeri yang di monev 3. Jumlah fasilitasi rekomendasi izin ke luar negeri bagi pejabat daerah dan ASN Pemerintah Daerah	23 Kerjasama 8 Kerjasama 12 Fasilitasi	59 16 146	256,52 % 200% 1.216,66 %	Program Kerjasama Pembangunan
3.	Meningkatnya sinergisitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan 2. Rata-rata tertimbang realisasi fisik di atas rata-rata	90 % 90 %	98 % 98,33 %	108,88 % 109,25 %	Peningkatan manajemen Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah

		3. Rata-rata tertimbang realisasi keuangan diatas rata-rata	90 %	93.75 %	104.16 %	
4.	Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah	1. Tingkat partisipasi perantau dalam pembangunan daerah di Nagari/Desa/Kel Binaan Kerjasama Rantau	19 Nagari/Desa/Kelurahan	17	89,47%	Program Kerjasama Pembangunan
		2. Kerjasama pemerintah daerah dibidang sosial budaya dan ekonomi	3 MoU	3	100%	

Berdasarkan tabel 2.4 sebagai pendukung sasaran strategis Perjanjian Kinerja Kepala Biro dapat disimpulkan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dari masing-masing target dan realisasi yang tercapai melebihi target. Penghitungan capaian kinerja dapat dilihat pada Bab III

Adapun untuk mendukung semua sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2018 maka terdapat 7 (tujuh) program pendukung dari sasaran Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dan 30 (tiga puluh) kegiatan yang dapat dilaksanakan pada anggaran yang tersedia di tahun 2018 denagan rincian sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Kerjasama Pembangunan	Rp 3.138.166.441,-	APBD
	a. Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan perantau minang di bidang social budaya dan ekonomi		
	b. Pendataan perantau minang di nagari/kelurahan		
	c. Pembentukan dan pembinaan nagari/kelurahan binaan kerjasama rantau		
	d. Peningkatan jaringan komunikasi pemerintha daerah dengan perantau minang		
	e. Pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah		
	f. Kerjasama luar negeri		
	g. Kerjasama pihak ketiga		
	h. Kerjasama antar provinsi		
	i. Kerjasama pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota		
	j. Kerjasama pemerintah daerah dengan kementrian/lembaga		
	k. Monitoring kerjasama dalam dan luar negeri		
2.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 205.022.372,-	APBD
	a. Pemanfaatan dan pengeloan website kerjasama rantau		
3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 751.575.434,-	APBD

	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah g. Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi h. Penyediaan makanan dan minuman 		
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 708.300.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan meubeleu b. Pengadaan computer dan jaringan computer c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor e. Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset OPD 		
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 23.312.800,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 		
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 97.353.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD b. Penatausahaan keuangan SKPD c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 		
7.	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp. 723.232.007,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi pengendalian evaluasi pembangunan 		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau jangka panjang, karena untuk pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam pengukuran akuntabilitas kinerja diperlukan data pendukung pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber internal dan eksternal, dengan pengertian sebagai berikut :

- a. **Data Internal**, yaitu yang berasal dari sistem informasi yang ada pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, dimana tingkat pengolahan data dilakukan pada level Bagian dan Sub Bagian serta staf yang berada pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.
- b. **Data Eksternal**, yaitu data yang berasal dari stakeholder atau pihak-pihak diluar Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, yang didapatkan melalui :
 - 1) Fasilitasi, pembinaan dan supervisi dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota baik sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah maupun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) Rapat-rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan unsur Forkompinda lingkup Pemerintah Provinsi;
 - 3) Rapat kerja/rapat koordinasi/bimbingan teknis/rapat dan pertemuan reguler Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Biro/Bagian yang berwenang dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- 4) Rapat kerja dan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas dalam rangka urusan penyelenggaraan pembuatan perjanjian kerjasama;
- 5) Rapat kerja dan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan sinergisitas antara Ranah dan Rantau;
- 6) Melakukan kunjungan secara langsung ke daerah dan Provinsi lain Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Kecamatan dan Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumatera Barat dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama dan sinergisitas ranah dan rantau;
- 7) Laporan secara berkala dari instansi yang berkaitan dengan wewenang tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan sebagai berikut :

Hasil Capaian (%)	Kategori Penilaian
85 - < 100	Sangat berhasil
75 - < 84	Berhasil
56- < 74	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan > **75 %**.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat - Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah - Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro 	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Tingkat partisipasi pelaku pembangunan	90%	253,29%	281,43%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bawah sasaran serta indikator kinerja dapat diukur dengan cara membandingkan Target yang akan di capai sebesar 90 % dengan Realisasi yang telah dicapai sebesar 759,89%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sejumlah 253,29% yang diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi seluruh sasaran pendukung}}{\text{Jumlah target}} \times 100 \%$$

Pengukuran capaian kinerja Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau tidak dapat berpedoman kepada RPJMD dan Renstra 2016-2021 yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan karena terjadinya pergantian nomenklatur dan tidak tertampungnya fungsi pembangunan pada RPJMD dan Renstra. Penghitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh eselon II dan eselon III dan dapat di lihat pada cascading (Pohon Kerja) Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mencapai perjanjian kinerja yang menjadi target Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau didukung oleh sasaran dari pada eselon 3 yang telah ditetapkan juga dengan perjanjian kinerja antara eselon 3 dan Kepala Biro. Dari hasil pengukuran capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai sasaran Biro didukung dengan sasaran eselon III dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai berikut ini :

Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya fasilitas Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/Pihak Ketiga lebih dari 557,73 %**. Capaian sasaran ini dilakukan melalui indikator kinerja seperti terlihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Meningkatnya fasilitas Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/Pihak Ketiga

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	- Meningkatnya kualitas kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat - Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah - Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro	Meningkatnya fasilitas Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/Pihak Ketiga	1. Jumlah kerjasama antar daerah/luar negeri/pihak ketiga 2. Jumlah kerjasama antar daerah/pihak ketiga/luar negeri yang di monev 3. Jumlah fasilitasi rekomendasi izin ke luar negeri bagi pejabat daerah dan ASN Pemerintah Daerah	23 kerjasama 8 kerjasama 12 fasilitasi	59 kerjasama 16 kerjasama 146 fasilitasi	256,52% 200% 1.216,66%

Dari tabel 3.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terdapatnya 3 (tiga) indikator kinerja pendukung sasaran Meningkatnya fasilitas kerjasama antar daerah/luar negeri/pihak ketiga, capaian kinerja yang dihasilkan melebihi dari target sasaran yang sudah ditetapkan.

Adapun formulasi yang di gunakan untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah realisasi Kerjasama/fasilitas}}{\text{Target realisasi Kerjasama/Fasilitas}} \times 100\%$

Target realisasi Kerjasama/Fasilitas

Sedangkan perbandingan dengan kondisi tahun sebelumnya dapat diperoleh data sebagai berikut pada tabel 3.3. Capaian Kinerja

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target		Realisasi		Capaian (%)		Ket.*
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah kerjasama antar daerah/luar negeri/pihak ketiga (buah)	0.0.0	15	23	43	59	286,66	256,52	
2.	Jumlah kerjasama antar daerah/pihak ketiga/luar negeri yang di monev	NA	NA	8	8	16	NA	200,00	
3.	Jumlah fasilitasi rekomendasi izin ke luar negeri bagi pejabat daerah dan ASN Pemerintah Daerah	NA	NA	12	NA	146	NA	1.216,66	
Rata-rata 2018								557,73	
Kriteria Penilaian		Sangat Berhasil							

*Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan.

Dalam pelaksanaannya sasaran Meningkatnya fasilitas Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/Pihak Ketiga didukung oleh beberapa kegiatan yang dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah
2. Kerjasama Luar Negeri
3. Kerjasama Pihak Ketiga
4. Kerjasama Antar Provinsi
5. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota
6. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian atau Lembaga
7. Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Adapun kegiatan pendukung sasaran strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tersebut dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah

Untuk memfasilitasi, fungsi kerjasama didukung oleh satu kegiatan yakni "Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah". Target kinerja kegiatan pembinaan dan pengawasan kerjasama ditahun 2018 terdiri atas :

- a. Fasilitasi Kerjasama Daerah untuk mewujudkan naskah kerjasama dalam bentuk MoU dan atau Pks;
- b. Pembinaan terhadap SKPD provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Rakor Kerjasama kabupaten/kota dan OPD provinsi Sumatera Barat;
- d. Konsultasi dan sharring ke Provinsi yang lebih baik pengelolaan urusan kerjasamanya;
- e. Penjajakan dan pembahasan naskah kerjasama antar Daerah.

Kinerja bagian Kerjasama Daerah selama tahun 2018 secara umum berjalan dengan baik. Sedikitnya 31 Kerjasama telah dibahas sepanjang tahun ini. Hasilnya adalah 21 Kesepakatan Bersama (MoU) dan 33 Perjanjian Kerja Sama (PKs). Capaian ini diharapkan dapat memberikan dampak guna membantu pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Beberapa diantara kesepakatan yang telah dicapai diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan Sumatera Barat kedepannya

Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 351.677.425,- dengan besar serapan anggaran sebesar Rp. 248.441.365,- atau 70,64. Rendahnya serapan disebabkan kurangnya disebabkan karena kurangnya pengajuan pelaksanaan kerjasama.

2. Kerjasama Luar Negeri

Dalam tahun 2018 terdapat beberapa kerjasama luar negeri yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam bentuk *sister province/ sister city* yang sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI melalui Pusat Fasilitas Kerja Sama, yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2019 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Jeolabuk-do (Korea Selatan)
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Fez-Meknes (Maroko)
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Ibaraki (Jepang)
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kazan (Rusia)
5. Pemerintah Kota Padang dengan Hildesheim (Jerman)
6. Pemerintah Kota Padang dengan Frementale (Australia)

Dengan pemahaman dan penguasaan aspek kerja sama yang baik, maka kerja sama dapat menjadi salah satu potensi untuk mendukung dan mengisi celah pembangunan yang belum dapat dipenuhi seutuhnya oleh Pemerintah, baik untuk program pembangunan di level nasional maupun untuk pembangunan di level daerah. Dukungan dari Lembaga non Pemerintah diluar negeri, Organisasi Internasional dan Lembaga Asing akan membantu Pemerintah Daerah meningkat pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan sumber pendapatan daerah dan APBD disetiap daerah.

Dalam tahun 2018 terdapat beberapa kerjasama luar negeri yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk *sister province* yang sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama, yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2019 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Unwell University (Birkenfeld - Jerman),
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan *Illinois University* (Chicago – Amerika Serikat),
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan *Deakin University* (Melbourne – Australia)
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan *Tsukuba of University* (Tsukuba – Jepang), dan
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan *International Bufallo Federation* (Italia),
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ENTS (Entaglement Technology Search) (Italia)
7. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Anhui International Hui-Merchants Association (China),
8. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Riza Farming (Brunei Darussalam)

Untuk Kerjasama Luar Negeri Tahun 2018 memiliki anggaran sebesar Rp. 142.497.400 dengan realisasi anggaran Rp. 133.427.260 atau 93,63 %

3. Kerjasama Pihak Ketiga

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/ Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Badan Hukum. Badan Hukum meliputi perusahaan

swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Sub Bagian Kerjasama dengan Pihak Ketiga memfasilitasi kerja sama antara SKPD yang ada di Provinsi Sumatera Barat hingga mencapai tahap persiapan dan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara para pihak yang saling menguntungkan dan mempunyai tujuan yang sama.

Sistem dan prosedur dalam pembahasan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini, nantinya setiap instansi yang ingin mengajukan draft kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama dimaksud, untuk dilakukan pembahasan oleh TTKSD dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Cq. Biro Kerjasama dan Rantau selaku Sekretaris TTKSD. Biro Kerjasama dan Rantau akan memverifikasi draft tersebut dan mengusulkan penjadwalan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TTKSD Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pembahasan oleh TTKSD.

Dalam menindaklanjuti usulan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja sama yang dibuat oleh instansi vertikal dan horizontal, Biro Kerjasama dan Rantau mempunyai tugas pokok memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. TTKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
- g. Memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota.

Setiap instansi di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ingin bekerja sama dengan Pihak Ketiga atau sebaliknya dapat mengajukan surat permohonan kepada Ketua TKKSD Provinsi Sumatera Barat untuk difasilitasi dalam pelaksanaan kerja samanya. Selanjutnya Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau selaku Sekretariat TKKSD akan memverifikasi draft tersebut dan mengusulkan penjadwalan pembahasan draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pembahasan oleh TKKSD.

Rapat-Rapat Fasilitasi dan Koordinasi telah menghasilkan 7 (tujuh) Kesepakatan Bersama dan 14 (empat belas) Perjanjian Kerja Sama. Pada tahun 2019, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembuatan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang baru, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat pada tahun 2018.

REKAPITULASI KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2018

No	URAIAN KERJASAMA	NOMOR	OPD PENGAGAS
1	Kesepakatan Bersama Antara Yayasan Minangkabau World Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Kerjasama Sistem Manajemen Digital Halal Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat	120-01/MOU/GSB-2018	Bagian Rantau Biro Kerjasama, Pembangunan Dan Rantau
2	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Penelitian, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Sumatera Barat	120-02/MOU/GSB-2018	Dinas Esdm Provinsi Sumatera Barat
3	Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera barat dengan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga provinsi sumatera barat dengan pt. Semen padang dan pt. Pertamina tbbm teluk kabung dan pt. Bank pembangunan daerah sumatera barat dan pt. Pertamina dppu bim dan pt. Lembah karet dan pt. Tidar kerinci agung dan pt. Mutiara agam dan pt. Tirta investama dan pt. Pn vi nusantara danau kembar dan pt. Sumbar andalas kencana dan pt. Mitra kerinci dan pt. Pln plta maninjau dan pt. Bakrie pasaman plantation dan pt. Kencana sawit indonesia dan pt. Batang hari barisan dan pt. Pln pauh limo dan pt. Perkebunan pelalu raya dan pt. Pasaman marama sejahtera dan pt. Selago makmur plantation dan pt. Agrowiratama dan pt. Kilang lima gunung dan pt pln teluk sirih tentang pelaksanaan program wanita peduli sampah di provinsi sumatera barat	120-04/MOU/GSB-2018	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

4	Kesepakatan bersama antara pt. Taspen (persero) dengan pemerintah provinsi sumatera barat tentang kerjasama penutupan produk pt. Asuransi jiwa taspen bagi aparaturn sipil negara di wilayah sumatera barat	120-05/MOU/GSB-2018	Bakeuda Provinsi Sumatera Barat Dan Biro Organisasi
5	Kesepakatan Bersama Antara Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia Cabang Padang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Kerjasama Sistem Penanggulangan Gawat Darurat (Spgd) Jantung Di Sumatera Barat	120-06/MOU/GSB-2018	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
6	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Kementerian Pariwisata Ri Tentang Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner Dan Belanja Di Sumatera Barat	120-08/MOU/GSB-2018	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
7	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Universitas Baiturrahmah Tentang Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Di Rumah Sakit Umum Daerah Solok	120-10/MOU/GSB-2018	Rumah Sakit Umum Daerah Solok
8	Kesepakatan Bersama Antara Universitas Terbuka Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Provinsi Sumatera Barat	120.16/MOU/65B-2018	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
9	Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Kerja Sama Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Di Provinsi Sumatera Barat	120.17/MOU/GSB-2018	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
10	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Ikatan Keluarga Minang (Ikm) Sapayuang Sulsebar Tentang Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perantau Minang Di Bidang Sosial, Budaya Dan Ekonomi	120-18/MOU/GSB-2018	Bagian Rantau Biro Kerjasama, Pembangunan Dan Rantau
11	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkmen Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan Dan Pengabdian Masyarakat Di Provinsi Sumatera Barat	120-13/MOU/GSB-2018	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

4. Kerjasama Antar Provinsi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menginisiasi pelaksanaan kerjasama daerah terutama pada wilayah se pulau Sumatera. Pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan dan diawali dengan rakor antara pengelola kerjasama se Sumatera yang dilakukan pada 8 maret 2018. Rapat tersebut dalam rangka menyatukan visi dan misi dalam pelaksanaan kerjasama ke depannya dengan memperkuat kesepakatan pemerintah povinsi se sumaera awalnya. Diharapkan akan ada pertukaran data, potensi kerjasama yang akan disampaikan. Sehingga akan ada rencana kerjasama untuk kedepannya.

Adapun hasil pelaksanaan rapat koordinasi tersebut antara lain :

- Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari forum rakor Gubernur, sehingga ini mejadi bahan untuk bahan dan masukan kepada bapak gubernur, jadi kita bisa menyusun langkah di tingkat pelaksana, dan bisa memberikan konstribusi dalam

melaksanakan kerjasama kedepan, dengan menyiapkan database, ataupun potensi yang bisa di akses secara bersama.

- Tujuan dilaksanakan rapat kerja ini untuk bersilaturahmi dan memperkuat rencana kerjasama kedepan yang tentu juga memperkuat forum rakorgub.
- Hasil rakorgub yang akan dilaksanakan di Sumbar tahun ini bisa berupa draft MoU (yang memuat syarat syarat sebuah dokumen MoU berdasarkan PP 28 tahun 2018 dan permendagri 22 tahun 2009) yang akan di tandatangani oleh kepala daerah, bukan lagi berupa dokumen kesepakatan bersama biasa (Berita Acara Rapat) yang tidak bisa disebut sebagai dokumen MoU (karena tidak ada jangka waktu dan penomoran). Kemudian masing masing prov dengan prov lain juga bisa langsung bekerjasama, bukan hanya dengan Sumbar saja.
- Draft MoU (Kesepakatan Bersama) sudah disiapkan dan perlu masukan saran dan perbaikan dari TKKSD Provinsi Se Sumatera untuk proses penyempurnaan (Via telpon atau email).
- Untuk kedepan masing-masing daerah punya database/potensi kerjasama yang bisa di akomodir dalam databank (bank data) atau single database se Sumatera

Pelaksanaan penandatanganan Kerjasama daerah se sumatera tersebut dilaksanakan ada acara rapat koordinasi Gubernur se Sumatera yang dilaksanakan pada 22 November 2018 yang bertempat di Hotel Inna Muara Padang.

Adapun hasil kesepakatan Bersama kerjasama se sumatera tersebut memuat dan menyetujui beberapa ruang lingkup kesepakatan antara lain :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan penataan ruang
- d. infrastruktur dasar permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana
- g. Distribusi dan Ketersediaan Pangan
- h. Ruang lingkup lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
 - Mendorong pembangunan bidang kepariwisataan se Wilayah Sumatera
 - Penyelenggaraan PON XXIV Tahun 2024 di Provinsi Aceh - Sumut
 - Aturan terkait dengan angkutan online, over loading dan over dimensi kendaraan barang secara nasional
 - Menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sampai dengan akhir Tahun 2018

- Memperkuat sumber daya manusia dan menumbuhkan daya inovatif masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) setuju dengan tindak lanjut dan usulan yang sudah diajukan
- Pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak serta trafficking orang
- Serta ruang lingkup lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama yang ditawarkan meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang nantinya diharapkan akan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala OPD masing-masing sesuai kebutuhan

a. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Transmigrasi Antar Provinsi.

Adapun tujuan Kesepakatan bersama dimaksud adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di dalam kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah masing-masing.

Untuk ruang lingkup Kesepakatan Bersama akan direncanakan :

- Perumusan kebijakan dan regulasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung/Kamang Baru;
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung/Kamang Baru;
- Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung/Kamang Baru;
- Motivasi dan mediasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung/Kamang Baru
- Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung/Kamang Baru; dan
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung/Kamang Baru

b. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tentang penyelenggaraan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi muara takung Kabupaten Sijunjung.

c. Kerjasama Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tentang Distribusi dan ketersediaan Pangan (tindak lanjut MoU Prov Sumbar dengan Prov Kepri dan Kota Batam Tahun 2017)

Pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pihak Ketiga di tahun 2018 memiliki anggaran Rp. 148.158.000,- dengan jumlah serapan sebesar Rp.133.520.208 atau 90,12%

5. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kerjasama Antar Daerah untuk tahun 2018 khususnya kerjasama pemerintah provinsi dengan Kabupaten/kota dilaksanakan melalui antara lain :

1. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama pemerintah provinsi dengan Kabupaten/kota, memberikan asistensi, mengkoordinir TTKSD untuk melakukan pembahasan Naskah Kerjasama sampai dengan penandatanganan Naskah kerjasama baik itu Kesepakatan (MoU) ataupun Perjanjian kerjasama (PKS).
 - a. Fasilitasi kerjasama daerah berbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh.
 - b. Fasilitasi kerjasama daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Agam Bukittingi, Lima Puluh Kota Payakumbuh serta Tanah Datar Padang Panjang terkait kerjasama system penyediaan air minum kawasan.
2. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota
 - a. Kesepakatan Bersama (MoU) Antara pemerintah Provinsi Barat dengan Pemko Padang tentang pelaksanaan Kegiatan rembug Madya KTNA 2018, 2019, dan 2020 dan rembug utama kontak tani nelayan andalan (KTNA) nasional tahun 2010 serta Penas Petani Nelayan XVI Tahun 2020
 - b. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tentang (kerjasama pembukaan kompetensi keahlian kriya kreatif bayik dan tekstil pada SMK 1 Lintau Buo) pemanfaatan sentra industry tenun untuk pelaksanaan praktek siswa sekolah menengah kejuruan se-provinsi Sumatera Barat
 - c. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tentang pelaksanaan Pekan olahraga Provinsi (PORPROV) VX Tahun 2018 di Kab. Padang Pariaman
 - d. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kab. Pessel, kab solok, kab. Lima puluh kota, Kab Tanah Datar, Kab Sijunjung, Kab. Kep. Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto tentang pengembangan pembangunan destinasi pariwisata.

- e. Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat tentang Perdagangan Komoditas Barang Kebutuhan Pokok Antar Kabupaten / kota Provinsi Sumatera Barat.
3. Kerjasama Pemerintah provinsi dengan Kabupaten/kota yang masih dalam proses pembahasan lebih lanjut, antara lain :
- a. Perjanjian Kerjasama antara dinas pariwisata provinsi dengan dinas pariwisata kabupaten/kota. Pelaksanaan kerjasama ini masih ditunda dan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bakeuda. Hal ini disebabkan daa BKK Tahun 2018 untuk kegiatan kepariwisataan (Destinasi pariwisata) terevaluasi oleh Kemendagri.
 - b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Sebagai Penerima Dan Pengelola Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Diwilayah Kerja South West Bukit Barisan. Pelaksanaan kerjasama ini tertunda karena permintaan kabupaten sijunjung untuk dilakukan kajian ulang serta pembahasan oleh internal pemerintah kabupaten.
 - c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Sijunjung tentang Geopark Silokek Sijunjung. Pelaksanaan kerjasama ini tertunda karena dinas teknis di Provinsi (Dinas Pariwisata meminta supaya untuk MoU ini dilakukan global serta bersamaan dengan kabupaten kota lain yang berpotensi untuk kegiatan Geopark.
 - d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Agam Bukittingi, Lima Puluh Kota Payakumbuh serta Tanah Datar Padang Panjang terkait kerjasama system penyediaan air minum kawasan. Pelaksanaan kerjasama ini tertunda karena masih menunggu fasilitasi dari Fasker Kemendagri. Hal ini disebabkan ikut terlibatnya kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pelaksanaan kerjasama ini. Sehingga perlu MoU antara kementerian dalam negeri dan Kementerian terkait, yang tindaklanjutnya dilaksanakan kerjasama oleh Provinsi dengan Kab/kota serta dengan Dirjen terkait di Kementerian PUPR.

Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota memperoleh anggaran sebesar Rp. 90.618.818,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.834.911,- atau 93,62%.

6. Kerjasama pemerintah Daerah dengan Kementerian atau Lembaga

Selama tahun 2018, Sub Bagian Kerjasama dengan Pihak Ketiga telah memfasilitasi rapat TKKSD sebanyak 8 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat TKKSD pada tanggal 10 Januari 2018 perihal pembahasan usulan Kesepakatan Bersama Antara Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Sumatera Barat;
2. Rapat TKKSD pada tanggal 25 Januari 2018 yang membahas usulan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Rapat TKKSD pada tanggal 26 Januari 2018 yang membahas draft Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Indonesia.
4. Rapat TKKSD pada tanggal 20 Februari 2018 membahas draft Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka tentang Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka di Nagari Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya.
5. Rapat TKKSD pada tanggal 20 Februari 2018 membahas usulan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
6. Rapat TKKSD tanggal 5 Maret 2018 tentang draft usulan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Rapat TKKSD tanggal 28 Maret 2018 tentang draft usulan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tentang Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja di Sumatera Barat
8. Rapat TKKSD tanggal 28 Maret 2018 tentang draft usulan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

9. Rapat TKKSD tanggal 15 Mei 2018 tentang pembahasan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Antara RSUD Solok dengan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
10. Rapat TKKSD tanggal 24 Mei 2018 tentang pembahasan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sumbar dengan Pengadilan Tinggi Padang dengan Kepolisian Sumbar dengan Kanwil Kum dan Ham dengan Kanwil Kemenag Sumbar tentang Percepatan Pelaksanaan dan Pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Sumbar.
11. Rapat TKKSD tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang pelaksanaan kegiatan Silek Arts Festival.
12. Rapat TKKSD tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama antara SEAMEO SEAMOLEC dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan draft Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
13. Rapat TKKSD tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pembahasan draft Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
14. Rapat TKKSD tanggal 28 September 2018 tentang Pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan BPTP Balitbangtan Sumatera Barat.
15. Rapat TKKSD tanggal 28 September 2018 tentang Pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
16. Rapat TKKSD tanggal 4 Oktober 2018 tentang Pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota.

17. Rapat TKKSD tanggal 14 November 2018 tentang Pembahasan rencana kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Kerja Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Sumatera Barat.

Rapat-Rapat Fasilitasi dan Koordinasi tersebut telah menghasilkan 5 (lima) Kesepakatan Bersama dan 9 (sembilan) Perjanjian Kerja Sama. Pada tahun 2019, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembuatan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang baru, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat pada tahun 2018.

Untuk Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian atau Lembaga anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan sebuah kegiatan yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau 55,56%.

7. Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

A. PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

Pelaksanaan kegiatan Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri merupakan penunjang dari pelaksanaan kegiatan kerjasama ke luar negeri oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun anggaran yang tersedia di tahun 2018 sebesar Rp. 1.395.908.642,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.374.175.359 atau 98,44 %. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebagai berikut :

1. REKOMENDASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pasal 16 ayat 3 (h) menyebutkan salah satu tugas Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yakni Menyelenggarakan analisis dan pertimbangan guna penerbitan rekomendasi bagi pejabat/ASN provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kerjasama ataupun berkunjung ke Luar Negeri terhitung pada tanggal 2 Januari 2018, rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Kementerian Dalam Negeri RI bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, ASN Provinsi Sumatera Barat dan ASN Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan perjalan dinas telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Permendagri 8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permendagri 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, **bahwa terhitung 5 Mei 2018 proses administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri bagi KDH, WKDH, DPRD dan ASN Pemerintah Daerah dialamatkan Kepada Sekretaris Jenderal Kemeterian Dalam Negeri Cq. Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama.**

Kemeterian Dalam Negeri RI yang merupakan pintu awal dalam menyampaikan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri dengan Kementerian Sekreatris Negara RI dalam pengeluaran SP (Surat Persetujuan) dalam melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, dimana selama ini Kementerian Sekretaris Negara mengeluarkan SP terhadap ASN atau kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan tanpa menimbang jadwal dari keberangkatan yang melaksanakan perjalanan dinas keluar negeri. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara menyampaikan, dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri harus benar-benar bersifat urgensi dan sangat penting dan mempertimbangkan azas manfaat bagi masyarakat di daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar negeridiharapkan dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan maksimal, sungguh-sungguh dan selalu menjaga *posting*-an melalui media sosial demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Selama Tahun Anggaran Tahun 2018, Jumlah rekomendasi **146** rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI yang berasal dari OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dengan nama-nama OPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

a. OPD PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Dinas Pariwisata

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Dinas Energi Sumber Daya Mineral
- Dinas Koperasi dan UMKM
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Dinas Kesehatan
- Dinas Kebudayaan
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
- b. **PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SUMATERA BARAT**
 - Pemerintah Kota Padang
 - Pemerintah Kota Payakumbuh
 - Pemerintah Kota Padang Panjang
 - Pemerintah Kota Bukittinggi
 - Pemerintah Kota Sawahlunto
 - Pemerintah Kota Pariaman
 - Pemerintah Kota Solok
 - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 - Pemerintah Kabupaten Sijunjung
 - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
 - Pemerintah Kabupaten Agam
 - Pemerintah Kabupaten Pasaman
 - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
 - Pemerintah Kabupaten 50 kota
 - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
 - Pemerintah Kabupaten Solok
 - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
 - Biro Humas
 - Biro Perekonomian
 - Biro Umum

Beberapa kegiatan Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

1. PELAKSANAAN PENJAJAKAN KERJASAMA KE CHICAGO – AMERIKA SERIKAT PADA TANGGAL 23 s.d 29 MARET 2018.

Berdasarkan surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia No. B-708/Kemensetneg/Ses/LN.00.00/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri, maka bersama ini dapat kami laporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional diperlukan berbagai upaya yang semaksimal mungkin untuk mendorong keterlibatan para pengusaha yang ada diluar negeri untuk tertarik berinvestasi di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya mendorong lebih banyak para pelaku usaha dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk melaksanakan kegiatan promosi daerah pada Kegiatan Breakfast Meeting dengan American Society of Travel Agent (ASTA) dan beberapa agenda temu bisnis dan kegiatan lainnya di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 23–29 Maret 2018.
- b. ASTA merupakan salah satu asosiasi travel agent terbesar di dunia yang keanggotaannya juga meliputi *travel supplier* dan *travel operators* berskala internasional yang berpotensi besar bagi Sumatera Barat untuk mempromosikan beberapa tujuan wisata unggulan dan membuka akses kepariwisataan khususnya Sumatera Barat ke benua Amerika. Kegiatan ini akan diikuti oleh lebih kurang 40 *travel supplier* dan *travel operators* yang menjadikan kegiatan ini sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan wisata dan budaya Sumatera Barat termasuk kuliner khas Sumatera Barat sehingga terbentuk suatu jaringan bisnis yang memudahkan dan membuka akses promosi wisata Sumatera Barat ke benua Amerika dan sekitarnya.

HASIL DARI KUNJUNGAN

- a. Untuk memaksimalkan hasil kunjungan Sumatera Barat ke Chicago, selain mengikuti kegiatan Breakfast Meeting, Pemerintah Provinsi Sumbar juga melakukan kegiatan *Business Opportunities in West Sumatera* dalam rangka promosi daerah di bidang investasi kepada para pelaku usaha dan investor potensial Chicago dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional khususnya Sumatera Barat. Dalam hal ini Sumatera barat akan mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor *renewable energy, micro hydro powerplant, fishery, mining, transportation, industry dan sites for center industry* yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama.

- b. Dalam Hasil Kegiatan dimaksud Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didampingi oleh KJRI untuk Chicago mendapatkan tawaran dari pengusaha dan Kadin Illinois – Chicago guna menerima rendang untuk dipasarkan di kawasan Amerika Serikat serta tawaran kerjasama dengan *Illinois University* dalam bentuk pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah.
2. FINAL MEETING PERSIAPAN LOI SISTER PROVINCE DAN MELIHAT POTENSI YANG AKAN DI KERJASAMAKAN PADA TANGGAL 22 S.D 27 MARET 2018 DI KOTA JEONJU PROVINSI JEOLLABUK-DO, KOREA SELATAN

Kunjungan Delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Korea Selatan khususnya Ke Provinsi Jeollabuk-do, bertujuan untuk final meeting persiapan Loi Kerjasama Sister Province di Jeonju City of Jeollabuk-do. Sekaligus juga melaksanakan penjajakan peluang kerjasama *Sister Province* dengan Provinsi Jeollabuk-do yang akan ditawarkan pada bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta bidang-bidang lainnya akan akan disepakati dalam pertemuan di Capital Hall.

Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 27 Maret 2018 ke Jeonju City Provinsi Jeollabuk-do, Korea Selatan. Kota Jeonju adalah sebuah ibukota di Jeollabuk-do, salah satu kota terkenal di Korea Selatan. Kota ini terletak 120 km sebelah Selatan Kota Seoul , berpenduduk 1,869,711 jiwa. Luas wilayah Provinsi Jeollabuk-do adalah 8,067 km². Provinsi Jeollabuk-do memiliki 6 Kota dan 8 Kabupaten sebagai pendukung administrasi. Dalam hubungan internasional, Jeollabuk-do telah melaksanakan *sisterhood* dan *partnership* dengan Jiangsu-RRC, Washington, New Jersey, serta *partnership* dengan Kagoshima Prefecture, Ishikawa Prefecture, Shanghai dan Shandong-RCC.

HASIL DARI KUNJUNGAN

- Adapun materi dan ruang lingkup yang akan di kerjasama pada rencana *sister province* Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jeollabuk-do yang akan dilaksanakan adalah pendidikan, pariwisata, kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Setelah kunjungan yang telah dilaksanakan tersebut Pemerintah Provinsi Jeollabuk-do akan datang ke Sumatera Barat sesuai dengan Undangan dari Gubernur Sumatera Barat yang direncanakan tanggal November 2018 sebagai

kunjungan balasan dan juga guna penandatanganan LoI kerjasama *Sister Province* tersebut.

- Akan dilaksanakan kajian mengenai pelaksanaan *Sister Province* baik dari pihak Provinsi Sumatera Barat maupun Provinsi Jeollabuk-do, sehingga dalam penyusunan *Action Plan* dapat terlaksana dengan baik.
- Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul sangat mendukung sekali terlaksananya kerjasama *Sister Province* ini. Apa saja yang dibutuhkan untuk terealisasinya hal tersebut akan diberikan Pihak KBRI.
- Ditambah draf LoI yang sudah dibahas melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa Kementerian terkait.

3. MENGHADIRI *THE 2ND INDONESIA WEEK* DI NAGOYA, JEPANG DAN TEMU BISNIS DENGAN PENGUSAHA DI JEPANG PADA TANGGAL 26 APRIL S.D 1 MEI 2018.

Keikutsertaan pada promosi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengenalan dan menginformasikan secara fisik produk-produk IKM kerajinan, tekstil, kuliner/makanan, destinasi pariwisata, dan investasi di bidang perikanan dan energi baru terbarukan Sumatera Barat. Dari promosi ini, masyarakat akan dapat melihat dan memasarkan secara langsung dari produk yang dihasilkan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pembeli untuk dapat menjadi pembeli dari produk yang ditawarkan. Selain dari pada itu, pameran destinasi pariwisata, serta temu bisnis atau kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan yang potensial sebagai investor juga diharapkan dapat menarik investasi dari pengusaha Jepang.

HASIL DARI KUNJUNGAN

- Adapun materi dan ruang lingkup kegiatan dimaksud, diharapkan ekspor ikan tuna di Sumatera Barat meningkat serta investor yang berada di Jepang dapat menanamkan sahamnya ke wilayah di Sumatera Barat.
- Kemudian, wilayah Sumatera Barat dapat belajar bagaimana wilayah Jepang meningkatkan wilayah sektor pariwisata, kebudayaan dan perikanan.
- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendapatkan pembelajaran terkait pengembangan kawasan 1000 rumah gadang melalui Desa Shirakawa-go.

- Pemerintah Kota Solok ikut berpartisipasi dalam memeriahkan **THE 2ND INDONESIA WEEK DI NAGOYA, JEPANG** dengan membawa tim tari bina Pemerintah Kota Solok.
 - Sedangkan Kabupaten Agam mendapatkan penawaran kerjasama oleh perusahaan di Jepang terkait pengembangan Air Danau sebagai Sumber Tenaga Listrik untuk dilakukan di Danau Maninjau. Namun, potensi kerjasama dimaksud harus disampaikan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah Daerah.
4. MENGHADIRI RANGKAIAN KEGIATAN FEZ-MEKNES ECONOMIC FORUM (FMEF), MISI INVESTASI DAN PENDALAMAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI FEZ-MEKNES PADA TANGGAL 27 JUNI–1 JULI 2018

Berdasarkan surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia No. B-B-1896/ Kemensetneg/ Ses/ LN.00.00/ 06/ 2018 tanggal 25 Juni 2018 dan No. B-0001807/ Kemensetneg/ Set/ KTLN/ LN.01.00/ 06/ 2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri, maka bersama ini dapat kami laporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional diperlukan berbagai upaya yang semaksimal mungkin untuk mendorong keterlibatan para pengusaha yang ada diluar negeri untuk tertarik berinvestasi di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya mendorong lebih banyak para pelaku usaha dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk melaksanakan kegiatan promosi daerah pada Kegiatan Fez Economic Forum (FEF) tanggal 27 sd 29 Juni 2018 di Rabat, Maroko berdasarkan surat undangan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko Merangkap Republik Islam Mauritania di Rabat, Maroko Nomor 27/DB/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Undangan Partisipasi pada Fez Economic Forum (FEF) tanggal 27 sd 29 Juni 2018 di Rabat, Maroko.
2. Fez Economic Forum (FEF) adalah forum ekonomi yang mempertemukan business people di seluruh wilayah Maroko serta dari beberapa negara khususnya yang memiliki kerjasama sister city dengan Kota Fez. Selain itu, FEZ merupakan acara pertemuan bisnis yang membahas berbagai isu terkini terutama tentang peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi dan bisnis diantara negara peserta termasuk kerjasama bilateral bidang TTI dengan Maroko. Pada penyelenggaraan

FEF yang kedua Tahun 2018, Indonesia menjadi negara mitra dan sebagai peserta kehormatan.

3. Hal ini merupakan ajang yang sangat potensial bagi Sumatera Barat dalam upaya mempromosikan kapasitas investasi Sumatera Barat ke kalangan internasional dan kemungkinan kerjasama investasi (joint-venture) baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa sektor-sektor unggulan Sumatera Barat seperti tourism, renewable energy, micro hydro power plant, downstream industry, mining, fishery, spices yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat merupakan proyek-proyek investasi yang dapat ditawarkan dan terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama pada business meeting/one on one meeting kepada pelaku usaha dan investor potensial di Fez dan Meknes di Maroko.

HASIL DARI KUNJUNGAN

- a. Kegiatan ini dimaksud juga bertujuan menindaklanjuti kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Fez-Meknes, Maroko yang sudah terjalin sejak tahun 2014 tentang perdagangan, dimana menghasilkan transaksi antara pengusaha dari Sumatera Barat dengan Fez-Meknes dalam ekspor impor rempah dan kopi.
- b. Selanjutnya, keinginan Pemerintah Fez-Meknes yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat anatara lain, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang dalam bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan.

5. MENGHADIRI KEGIATAN FESTIVAL INDONESIA (FI-3) TANGGAL 1 SD 7 AGUSTUS 2018 DI MOSCOW, RUSSIA

Berdasarkan surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia No. B-2213/Kemensetneg/Ses/LN.00.00/07/201 tanggal 24 Juli 2018 perihal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri, maka bersama ini dapat kami laporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional diperlukan berbagai upaya yang semaksimal mungkin untuk mendorong keterlibatan para pengusaha yang ada diluar negeri untuk tertarik berinvestasi di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya mendorong lebih banyak para pelaku usaha dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk melaksanakan kegiatan promosi daerah pada Kegiatan Festival Indonesia (FI-3) tanggal 1 sd 7 Agustus 2018 di Moscow, Russia berdasarkan surat undangan Duta Besar Republik Indonesia untuk Moscow Nomor 816/KM/DBS/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Undangan Partisipasi Festival Indonesia ke-3 di Moscow, Rusia 3-5 Agustus 2018.

2. Festival Indonesia (FI-2017 ke-2 telah sukses diselenggarakan di Moscow tanggal 4-6 Agustus 2017 yang dihadiri sekitar 91.600 pengunjung. Berbeda dengan FI pertama FI ke-2 didahului dengan penyelenggaraan Forum Bisnis Kelapa Sawit dan Russia Indonesia Business Forum masing-masing pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2017 dan dilanjutkan dengan Business Meeting selama penyelenggaraan festival. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Federal Custom Service Rusia total perdagangan antara Indonesia dan Rusia pada Tahun 2016 sebesar US\$ 2.6 Milyar atau meningkat 33,4% dari Tahun 2015, dan Indonesai mengalami surplus sebesar US\$ 1,8 Milyar. Wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia pada semester pertama 2017 meningkat sebesar 58% dari tahun sebelumnya. Peningkatan angka ini tidak terlepas dari kesuksesan penyelenggaraan FI di Moscow. Pada FI ke-2 terdapat 70 booth yang dialokasikan secara gratis untuk daerah dan UKM, atau naik lebih dari 2 kali lipat dari penyelenggaraan sebelumnya (30 booth). Sementara kapasitas Hermitage Garden (6 Hektar) saat ini dirasa cukup sempit, KBRI Moscow melaksanakan kegiatan FI-3 di taman Krasnaya Presnya seluas 16,5 hektar, lokasi yang lebih luas dari sebelumnya.
3. Oleh karena potensi yang amat besar tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moscow kembali mengadakan Festival Indonesia ke-3 pada tanggal 1 s/d 8 Agustus 2018 yang akan didahului dengan *Business Forum* dan *Business Matching* pada tanggal 2 Agustus 2018 dan dilanjutkan dengan Business Matching bersamaan dengan rangkaian festival sampai tanggal 5 Agustus 2018.

HASIL DARI KUNJUNGAN

- a. Tawaran dari Provinsi Kazan – Rusia dalam bentuk kerjasama dengan pengembangan kereta api di Sumatera Barat sebagai hasil dari *Bussines Forum* yang dilaksanakan oleh panitia Festival Indonesia ke -3. Dimana Pemerintah

Provinsi Kazan merupakan Provinsi yang memiliki penduduk muslim di Rusia ditambah lagi Kazan merupakan provinsi yang menciptakan atau membuat kereta api di Indonesia saat zaman penjajahan Belanda.

- b.** Diharapkan kerjasama ini dapat terealisasi dan sudah dilaporkan ke Pusat Fasilitas Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri untuk di bahas ditahun 2019.
- c.** Serta pemerintah Sumatera Barat di Undang oleh Pemerintah Provinsi Kazan dalam perayaan ulang tahun Provinsi Kazan pada bulan Mei sekaligus membahas kerjasama mengenai pengembangan Kereta Api di Sumatera Barat.

6. MENGHADIRI UNDANGAN RESEPSI DIPLOMATIK, PAMERAN INDONESIA DAN *BUSSINES MEETING* DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE 73 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DI BRUNEI DARUSSALAM PADA TANGGAL 31 AGUSTUS S.D 4 SEPTEMBER 2018.

Berdasarkan surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia No. B-2568/Kemensetneg/Ses/LN.00.00/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan No.B-000117856/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.00/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri , maka bersama ini dapat kami laporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional diperlukan berbagai upaya yang semaksimal mungkin untuk mendorong keterlibatan para pengusaha yang ada diluar negeri untuk tertarik berinvestasi di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya mendorong lebih banyak para pelaku usaha dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk melaksanakan promosi wisata, investasi dan kerjasama ekonomi regional dan internasional pada tanggal 31 Agustus s/d 4 September 2018, berdasarkan undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan Nomor 001/DB/IV/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Undangan mengisi acara Resepsi Diplomatik dan Pameran Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 73 Proklamasi Kemerdekaan RI di Brunei Darussalam dan undangan Nomor 28/DB/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Undangan Business Meeting dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 73 Proklamasi Kemerdekaan RI di Brunei Darussalam.

2. Pada kegiatan tersebut, Provinsi Sumatera Barat akan berpartisipasi aktif dengan menampilkan "Paviliun Provinsi Sumatera Barat", disertai kegiatan sebagai berikut :
- Pameran Produk Unggulan Sumatera Barat
 - Pagelaran Seni dan Budaya Sumatera Barat
 - *Business Metting* dengan pengusaha di Brunei Darussalam
 - Kuliner Sumatera Barat dengan demo memasak makanan khas Sumatera Barat
 - Fashion Show Busana Muslim Tematik Budaya Minangkabau

HASIL DARI KUNJUNGAN

- a. Keinginan Ikatan Keluarga Minang yang berada di Brunei Darussalam membuka jalur bisnis ke Indonesia terutama Sumatera Barat ditambah dengan kebutuhan akan bahan pokok di Brunei Darussalam
 - b. Selanjutnya, rencana kerjasama dengan Riza Farming perusahaan yang bergerak dibidang peternakan ayam, yang sangat ingin memberikan ilmu mengenai pengembangan ayam ditambah lagi dengan keterbatasan lahan di Brunei Darussalam dan tingginya permintaan Ayam poong di Brunei Darussalam, pihak Riza Farming ini mengembangkan perusahaannya ke Indonesia terutama Sumatera Barat.
 - c. Dalam pelaksanaan Bussines Meeting, banyak invetor dari Brunei Darussalam yang ingin ikut mengembangkan energy terbarukan di Sumatera Barat.
7. MENGIKUTI KEGIATAN *15TH CHINA ASEAN EXPO (CAEXPO)* 2018 TANGGAL 12 S.D 15 SEPTEMBER 2018 DI NANNING, PROVINSI GUANGXI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Berdasarkan surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia No.B-00019339/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.00/09/2018 tanggal 06 September 2018 perihal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri, maka bersama ini dapat kami laporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

Dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional diperlukan berbagai upaya yang semaksimal mungkin untuk mendorong keterlibatan para pengusaha yang ada diluar negeri untuk tertarik berinvestasi di Indonesia. Berkenaan

dengan hal tersebut, dalam upaya mendorong lebih banyak para pelaku usaha dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk melaksanakan kegiatan promosi daerah pada Kegiatan 15th China ASEAN Expo (CAEXPO) 2018 tanggal 12-15 September 2018 di Nanning, Provinsi Guangxi, Republik Rakyat Tiongkok. Pameran CAEXPO merupakan pameran tahunan yang diadakan bersamaan dengan Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN-China yang ditujukan untuk peningkatan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pameran CAEXPO diselenggarakan sejak Tahun 2014 merupakan hasil kesepakatan pada KTT ASEAN-China ke-7, bulan Oktober 2003 di Bali dalam kerangka kerjasama perdagangan dan ekonomi CAFTA.

HASIL DARI KUNJUNGAN

- a. Hasil *business meeting* yang diminati oleh investor potensial China terkait sektor pariwisata, renewable energy diantaranya; Mr. Guo Wandong, perusahaan Anhui International Hui-Merchants Association yang berminat di *renewable energy* untuk pembangunan di pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan untuk sektor pariwisata diminati oleh Charrys Utasa, perusahaan yang bergerak di sektor wisata bahari.
 - b. Adanya investor dari China yang sangat ingin mengembangkan kawasan wisata Lembah Anai – Kabupaten Padang Pariaman dengan memberikan desain dan konsep pengembangan kawasan wisata lembah anak, dimana investor tersebut melihat Pariwisata Sumatera Barat melalui Website.
8. MENGHADIRI KEGIATAN *INDONESIA-AUSTRALIA BUSINESS SUMMIT (IABS) 2018, PENANDATANGAN MoU ANTARA DEAKIN UNIVERSITY DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN MINANG DIASPORA NETWORK - GLOBAL SUMMIT AND MINANGKABAU FESTIVAL 2018.*

Indonesia-Australia Business Summit (IABS) 2018 sebelumnya disebut sebagai Indonesia Fair telah dilakukan selama tiga kali berturut-turut sejak Tahun 2014 di Canberra dan Perth. Kegiatan ini berhasil mengangkat nama baik Indonesia di Australia dan menjadi *branding* kegiatan promosi bisnis terintegrasi Indonesia di Australia. Dari kegiatan ini pula telah berhasil ditindaklanjuti beberapa rencana proyek investasi dalam skala besar disamping berbagai proyek bisnis yang berskala kecil.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional diperlukan berbagai upaya yang semaksimal mungkin untuk mendorong keterlibatan para pengusaha yang ada diluar negeri untuk tertarik berinvestasi di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya mendorong lebih banyak para pelaku usaha dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud akan melaksanakan kegiatan promosi daerah pada Kegiatan Indonesia-Australia Business Summit (IABS) 2018 di Grand Hyath Hotel - Melbourne.

Selanjutnya, Deakin University mengundang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam membahas sebuah kerjasama dalam bidang akademis, pelatihan dan pertukaran tenaga pengajar guna meningkatkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018.

Kemudian, menghadiri undangan Ikatan Keluarga Minang Saiyo Melbourne dengan agenda pertemuan dengan perantau minang se-dunia di Melbourne pada tanggal 29 s.d 30 September 2018, dimana acara dimaksud mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan pembangunan wilayah Sumatera Barat melalui para perantau Minang di Seluruh dunia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk melaksanakan kegiatan promosi daerah pada Kegiatan *Indonesia-Australia Business Summit (IABS) Tahun 2018*, melaksanakan pembahasan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Deakin University dan acara Global Summit and Minangkabau Festival di 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 1 Oktober 2018.

Maksud dan tujuan kegiatan dimaksud antara lain :

- a. Menjaring potensi kerjasama di bidang energi, perdagangan, investasi, dan pariwisata serta mempromosikan kebudayaan Sumatera Barat dalam acara IABS 2018 di Melbourne.
- b. Menghasilkan sebuah kerjasama dengan Universitas yang memiliki SDM manusia yang berkualitas guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

c. Melaksanakan Silaturahmi dengan Perantau Minang seluruh dunia, guna membahas pembangunan Sumatera Barat kedepannya dalam kegiatan Global Summit and Minangkabau Festival 2018 dan mensosialisasikan agenda kegiatan pulang basamo se dunia yang diadakan di tahun 2020 di Sumatera Barat.

HASIL DARI KUNJUNGAN

- a. Terjalinnnya rencana kerjasama pada berbagai bidang sebagai hasil *One on one meeting* bersama pengusaha asal Australia dalam Forum Indonesia Australia Business Summit (IABS) 2018 antara lain :
 - Adrian Kennedy direktur Hiddensouk Australia, dalam meeting dibicarakan tentang kebutuhan tenaga kerja dibidang industri untuk tenaga montir, dan perawat di Australia, khusus perawat diperlukan kualifikasi kemampuan Bahasa Inggris, karena kebutuhan komunikasi dengan pasien.
 - Tony Mitchener menyampaikan perusahaan mereka membutuhkan rempah-rempah terutama jahe merah. Dimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menindaklanjuti dengan menghubungkan pengusaha Australia dengan penyedia rempah di Sumatera Barat.
 - Kemudian dengan pengusaha yang bergerak dibidang energi terbarukan, Mr. Peter Craven dari Katama Global Australia dalam Forum Indonesia Australia Business Summit (IABS) 2018, Mereka mengemukakan ketertarikan terhadap investasi dibidang energi, pada kesempatan itu kami juga mendiskusikan kebutuhan energi dan peluang pengembangan untuk ketersediaan listrik baik skala besar hingga kecil.
- b. Sebuah niat kerjasama antara Deakin University dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam membahas sebuah kerjasama dalam bidang akademis, pelatihan dan pertukaran tenaga pengajar guna meningkatkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam sebuah LoI (Letter of Intent) yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Prof. Prof. Katya Jonshon guru besar untuk Deakin University serta disaksikan oleh Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri, Kepala OPD terkait.
- c. Dalam Kegiatan MDN Festival Global Minangkabau Summit 2018, dimana seluruh ikatan keluarga minang seluruh dunia bersedia melakukan kerjasama untuk mensukseskan kegiatan pulang basamo se dunia tahun 2020.

9. KEGIATAN PROMOSI PELUANG INVESTASI DI SUMATERA BARAT SERTA PAGELARAN SENI BUDAYA DAN PAMERAN EUROCHOCOLATE DI ITALIA DAN MALTA PADA TANGGAL 18 S.D 24 OKTOBER 2018.

Tahun ini, perekonomian Sumatera Barat diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,1-5,5 persen. Seperti periode-periode sebelumnya, sumber pertumbuhan Sumbar masih berasal dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor luar negeri. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh membaiknya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Apalagi harga komoditas coklat, kopi dan minyak atsiri juga membaik tahun ini.

Ditambah lagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat memfokuskan pengembangan Energy terbarukan dan peningkatan jumlah kunjungan pariwisata baik itu wisata kuliner, budaya hingga wisata alam guna memacu pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, untuk menjamin kelangsungan pembangunan di Sumatera Barat, maka perencanaan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam ini perlu dilakukan dengan lebih cermat. Hubungan-hubungan diplomatis perlu ditingkatkan dan perlu dipromosikan ke pihak negara yang memungkinkan untuk melakukan investasi dan berwisata ke Sumatera Barat, sehingga kelangsungan pembangunan dapat terjamin secara menyeluruh.

Oleh sebab itu Tim Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Italia dan Malta dalam rangka Promosi Terpadu Dalam Mempromosikan Potensi Ekonomi Daerah Sekaligus Penjajakan Kerjasama Teknis Bidang Pertanian dengan Kementerian Pertanian dan Lembaga Penelitian guna mempromosikan potensi ekonomi daerah dan diplomatik seni budaya.

HASIL DARI KUNJUNGAN

- a. Delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dubes RI untuk Roma menghadiri temu bisnis Konfederasi Industri Italia di Confindustria yang menghasilkan minat Investasi dan perdagangan yang meliputi Agroindustri yang diantaranya kopi, coklat, rempah dll, dalam paparan tersebut disektor Pariwisata di ekspose tentang peluang investasi di Kepulauan Mentawai, Gunung Padang,

Mandeh dan Potensi energi terbarukan, geothermal dan hydro energi di Sumatera Barat

- b. Delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadiri Temu Bisnis pada Festival Eurochocolate. Eurochocolate merupakan salah satu festival dan pameran coklat di Eropa yang terdiri dari pameran coklat, festival budaya, business summit di Perugia yang berlangsung pada tanggal 19-28 Oktober. Pada kegiatan Temu Bisnis ini Gubernur Sumatera Barat sebagai *special guest* menyampaikan paparan tentang potensi dan prospek coklat di Sumatera Barat. Pada kegiatan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga membawa beberapa produk dan hasil perkebunan di Sumatera Barat seperti coklat dari Kabupaten padang pariaman dan kopi dari Kabupaten Agam. Selain itu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat juga membawa beberapa sampel buah kakao yang ditanam di Sumatera Barat.
- c. penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dengan *International Buffalo Federation, Italia* yang memuat berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat, yang diantaranya kerjasama pertukaran informasi dan aktifitas terkait penelitian dan pengembangan peternakan, peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM, dan kerjasama lainnya

10. MENGHADIRI DAN MENDAMPINGI SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG DALAM RANGKA MELAKUKAN PENJAJAKAN KERJASAMA DAN STUDY TIRU PERTUKARAN INFORMASI MENGENAI PENATAAN KEARSIPAN PASCA BENCANA ALAM, PENGANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH KE JEPANG PADA TANGGAL 26 NOVEMBER S.D 2 DESEMBER 2018.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah berupaya melakukan pendampingan terkait rencana peninjauan kerjasama Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Daerah di Jepang, selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau melakukan peninjauan ulang terkait rencana kerjasama yang akan dilakukan dengan Provinsi Ibaraki, agar tahun 2019 dapat teralisasi.

Keikutsertaan pada kegiatan dimaksud guna melakukan peninjauan kerjasama terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Ibaraki dan pendampingan terhadap kunjungan delegasi Pemerintah Kota Padang ke Jepang.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan adalah mendapatkan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

HASIL DARI KUNJUNGAN

1. Setelah mendengarkan penjelasan dan tur arsip di *National Archives of Japan*, maka terdapat 3 hal yang dapat ditindaklanjuti untuk materi kerjasama antara *National Archives of Japan* dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, sebagai berikut:
 - a. Kerjasama dalam *digital archives*;
 - b. Kerjasama dalam memberikan training untuk pengelola kearsipan;
 - c. Kerjasama dalam restorasi *damaged document*.
2. Dalam pertemuan dengan Pemerintah Prefektur Ibaraki ada beberapa hal yang menjadi point penting yaitu;
 - a. Mengenai peninjauan kerjasama dalam bidang tata kelola air minum, pihak Pemerintah Prefektur Ibaraki kurang memahami mengenai tata kelola air minum karena biasanya dikelola oleh pemerintah daerah.
 - b. Kedua belah pihak meminta waktu untuk melakukan peninjauan kerjasama agar rencana kerjasama yang dilakukan dapat terlaksana dan tepat sasaran.
 - c. Pihak Pemerintah Ibaraki siap memfasilitasi kerjasama yang direncanakan, dan agar kedua belah pihak melakukan komunikasi yang intens untuk terlaksananya kerjasama.
 - d. Pemerintah Kota Padang ingin melakukan kerjasama dibidang pendidikan yakni pertukaran pelajar dan tenaga pengajar dengan Pemerintah Prefektur Ibaraki, terutama guru dan siswa tingkat sekolah dasar dan SMP.
 - e. Pemerintah Prefektur Ibaraki bersedia melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang pengelolaan sampah dan energi terbarukan.

11.KEGIATAN PAMERAN DAGANG L'ARTIGIANO IN FIERA 2018 DI MILAN - ITALIA DAN MALTA PADA TANGGAL 3 S.D 9 DESEMBER 2018

L'Artigiano in Fiera merupakan pameran dagang bersifat ritel terbesar di Italia. Pameran ini memamerkan berbagai produk seperti kerajinan, furniture, mainan,

lampu hias, patung, tekstil, makanan, perhiasan, kosmetik dan kecantikan dan produk lainnya.

Pameran Dagang L'Artigiano in Fiera 2018 di Milan merupakan salah satu pameran produk kerajinan dan makanan terbesar di Eropa yang diikuti lebih dari 1.000 perusahaan dan menempati stand sebanyak 3.200 stand. Pameran ini memamerkan produk berupa furniture,mainan.lampu hias,tekstil,makanan ringan,perhiasan, kosmetik dan produk lainnya. Disamping mengikuti Pameran dagang, kita juga menampilkan promosi kesenian dan budaya Sumatera Barat, serta mengikuti forum bisnis dengan beberapa pengusaha di Italia. Dalam upaya mempromosikan dan untuk mendorong peningkatan masuknya produk Indonesia ke Italia, kami memandang L'Artigiano in Fiera dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya melalui kegiatan pameran dagang ini. Untuk menarik minat para pengunjung menghadiri stand Indonesia, pada pameran ini juga dilakukan promosi pariwisata melalui pentas seni danbudaya Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional diperlukan berbagai upaya yang semaksimal mungkin untuk mendorong keterlibatan para pengusaha yang ada diluar negeri untuk tertarik berinvestasi di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya mendorong lebih banyak para pelaku usaha dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud akan melaksanakan kegiatan promosi daerah pada Kegiatan Pameran Dagang L'Artigiano in Fiera 2018 di Milan

HASIL DARI KUNJUNGAN

- a. Pertunjukan seni dan Budaya Sumatera Barat ditampilkan 5 kali setiap harinya dan selalu ramai ditonton pengunjung pameran L'Artigiano in Fiera, Milan yang berskala internasional, penampilan ini diminati hingga juga mendapat apresiasi direktur pameran dan koordinator pameran wilayah Asia.
- b. Penjajakan tentang kerjasama energi terbarukan bersama perusahaan ENTS (Entaglement Technology Search). ENTS adalah sebuah perusahaan Internasional yang berkantor di Trento Italia yang bergerak dibidang *Wind Energy, Hydrokinetic Energy, Preventive Maintenance* dan *MCU System Embedded*. Topografi Sumatera Barat yang relatif agak mirip dengan Trento Italia, yaitu berbukit-bukit, berpegunungan, serta banyaknya sumberdaya air dan angin, membuat ENTS

tertarik untuk menjajaki kerjasama dengan Sumatera Barat dan pengolahan limbah sampah yang dapat diolah menjadi energi baru dan terbarukan.

Dari tabel rekapitulasi di ataslah pelaksanaan kegiatan pengawasan kerjasama dilakukan.

Berikut jumlah perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan berbagai pihak selama tahun 2018 :

NO	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	MoU	PKS
1.	PEMERINTAH DAERAH	8	2
2.	KEMENTERIAN	5	13
3.	LEMBAGA NON KEMENTERIAN	4	16
4.	PIHAK KETIGA LAINNYA	3	2
JUMLAH		20	33

Pendukung capaian kinerja berikut yang mendukung sasaran strategis adalah **Meningkatnya sinergisitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah** adalah **107,43 %**. Capaian sasaran ini dilakukan melalui melalui indikator kinerja seperti terlihat pada Tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Meningkatkan sinergisitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat - Meningkatkan partisipasi perantau dalam pembangunan daerah - Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro 	Meningkatnya sinergisitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan 2. Rata-rata tertimbang realisasi fisik di atas rata-rata 3. Rata-rata tertimbang realisasi keuangan diatas rata-rata 	<p>90 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p>	<p>108,88%</p> <p>98,33%</p> <p>93,75 %</p>	<p>108,88 %</p> <p>109,25</p> <p>104,16</p>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap indikator kinerja yang sudah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja dapat di lihat hasil capaian kerjanya sangat memuaskan karena lebih dari 100%

Untuk menghitung capaian kerjanya dilakukan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\% \text{ KOEFISIEN TERTIMBANG SKPD} = \frac{\text{JUMLAH ALOKASI ANGGARAN SKPD}}{\text{JUMLAH APBD PROVINSI SUMBAR}}$$

$$\% \text{ JUMLAH ALOKASI ANGGARAN SKPD} = \frac{\text{JUMLAH ANGGARAN SKPD}}{\text{JUMLAH APBD PROVINSI SUMBAR}} \times 100\%$$

$$\% \text{ REALISASI KEUANGAN PEMPROV SUMBAR} = \frac{\sum \% \text{ REALISASI KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMBAR}}{\sum \text{SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMBAR}}$$

$$\% \text{ REALISASI KEUANGAN SKPD} = \frac{\text{JUMLAH ANGGARAN SKPD YANG DIGUNAKAN}}{\text{JUMLAH ALOKASI ANGGARAN SKPD}} \times 100\%$$

$$\% \text{ REALISASI KETEPATAN WAKTU PEMPROV SUMBAR} = \frac{\sum \% \text{ REALISASI KETEPATAN WAKTU SKPD SETIAP TRIWULAN}}{4}$$

$$\% \text{ REALISASI KETEPATAN WAKTU} = \frac{\text{KETEPATAN WAKTU SKPD DALAM PENGINPUTAN DATA DI SBE}}{\sum \text{SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMBAR}} \times 100\%$$

Tabel 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2017 dengan Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target		Realisasi		Capaian (%)		Ket.
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan	NA	NA	90	NA	98	NA	108,88	
2.	Rata-rata tertimbang realisasi fisik di atas rata-rata	NA	NA	90	NA	98,33	NA	109,25	
3.	Rata-rata tertimbang realisasi keuangan diatas rata-rata	NA	NA	90	NA	93,75	NA	104,16	
	Rata-rata 2018							107,43	
	Kriteria Penilaian	Sangat Berhasil							

* Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan

Untuk perbandingan capaian kinerja antara tahun 2017 dengan 2018 tidak dapat dirumuskan karena Sasaran Meningkatnya sinergisitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tidak terdapat pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

Hal ini disebabkan tahun 2017 fungsi pembangunan berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan baru dipindahkan ke Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau pada tahun 2018.

Untuk tahun 2018 Sasara Meningkatnya sinergisitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah didukung dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan dan Pengelolaan Website Kerjasama Rantau

Simbangda atau system informasi pembangunan daerah, sebenarnya sudah ada semenjak tahun 2014 yang lalu, hanya saja setelah dianalisa, ditemukan kondisi dimana terdapat kesalahan pada proses bussines aplikasi sehingga menyebabkan terjadinya crowded dan data ganda.

Website Biro Kerjasama dan Rantau sebenarnya telah dibuat oleh Dinas Kominfo pada awal tahun 2017. Akan tetapi dengan adanya perubahan nomenklatur dan tugas fungsi di tahun 2018, maka tentu website ini perlu disesuaikan.

Target kinerja yang diberikan kepada Tenaga Ahli ini salah satunya adalah melakukan upgrade atau bangun ulang aplikasi Simbangda. Target utama adalah bagaimana Simbangda ini menjadi aplikasi evaluasi capaian kinerja SKPD baik fisik dan keuangan berbasis bukti atau evidence, sehingga administrasi kegiatan bisa dikendalikan secara efektif.

Proses bussines yang diharapkan adalah bagaimana data program/kegiatan bisa sinkron otomatis atau ditarik mudah dari SIPKD sehingga tidak merepotkan operator SKPD. Selanjutnya Pemaketan dan penetapan target terekap dengan baik dan terkoneksi dengan realisasi sehingga bisa memunculkan angka deviasi. Tampilan report dalam bentuk table dan grafik. Dan nilai capaian kinerja diberikan otomatis atas dasar verifikasi/pengesahan dari help desk yang ada di Biro KPdR. Untuk mendukung kinerja sebagaimana kami jelaskan di atas, anggaran yang diperoleh sebesar 205.022.372 dan telah dimanfaatkan keuangan kegiatan sebesar Rp. 197.579,399 atau 96,36%.

Kegiatan ini membantu tugas pengendalian dimistrasi kegiatan dengan menggunakan aplikasi SIMBANGDA Berbasis Evidence (SBE). Aplikasi ini membantu seluruh OPD dalam melaporkan realisasi fisik dan keuangan beserta bukti (evidence) yang mengikuti setiap tahapan pekerjaan. Tercatat sampai akhir tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat realisasi fisik sebesar 96,92% dan Keuangan (BL) 89,26%

2. Koordinasi Pengendalian Evaluasi Pembangunan

APBD Sumatera Barat tahun 2018 yang mencapai Rp.6.634.349.848.473,- yang mencakup 445 program dan 3.403 kegiatan. Dari 3.403 kegiatan tersebut terdapat 4.101 paket pekerjaan baik itu swakelola ataupun melalui penyedia. Kesemua paket pekerjaan inilah yang perlu dikawal oleh Bagian Pembangunan terutama bagaimana

semua paket ini bisa terealisasi dengan baik dan tertib dalam administrasi pekerjaannya selama tahun 2018.

Untuk membantu tugas pengendalian Administrasi Kegiatan ini, Bagian Pembangunan menggunakan Aplikasi Simbangda Berbasis Evidence (SBE). Aplikasi ini akan membantu seluruh SKPD untuk melaporkan realisasi fisik dan keuangannya beserta bukti (evidence) yang mengikuti setiap tahapan pekerjaan yang mereka lakukan. Tercatat sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik Sumatera Barat adalah 96,92% dan Keuangan (BL) sebesar 89,26%.

Untuk mendukung efektifnya aplikasi SBE ini, kami melakukan beberapa tahapan pekerjaan, yakni :

1. Melakukan sosialisasi aplikasi SBE kepada semua SKPD;
2. Melakukan Penarikan data dari SIPKD yang mencakup Program, kegiatan dan pagu dana per kegiatan;
3. Rekon Data Base Program Kegiatan SKPD tahun 2018
4. Rekon Realisasi Triwulan II, III dan IV
5. Rapat Evaluasi tingkat Asisten
6. Rapat Evaluasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Untuk mendukung kegiatan Koordinasi Pengendalian Evaluasi Pembangunan di alokasi anggaran sebesar Rp. 723.232.007 dengan serapan sebesar Rp. 714.120.435 atau 98,74 %

Untuk sasaran strategis **Meningkatnya jaringan komunikasi, kerjasamaran dan rantau di bidang ekonomi, sosial budaya** capaian kinerja yang telah terseralisasi adalah **94,73%**. Capaian sasaran ini dilakukan melalui indikator kinerja seperti terlihat pada Tabel 3.6. sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perantau Dalam Pembangunan Daerah

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	- Meningkatnya kualitas kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat - Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah - Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro	Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah	1. Tingkat partisipasi pelaku pembangunan daerah di Nagari/Desa/ Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau 2. Kerjasama pemerintah daerah di bidang social budaya dan ekonomi	19 Nagari/desa /kelurahan 3 MoU	17 nagari/Desa /Kelurahan 3 MoU	89,47% 100%

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa untuk capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah terbagi atas 2 (dua) indikator kinerja yang

mana untuk Tingkat partisipasi pelaku pembangunan daerah di Desa/Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau sebesar 89,47 % dan Kerjasama pemerintah daerah di bidang sosial budaya dan ekonomi sebesar 100%.

Adapun foomulasi yang digunakan untuk penghitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pelaku Pembangunan}}{\text{Jumlah Target Pelaku Pembangunan}} \times 100\%$$

Selanjutnya juga dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target		Realisasi		Capaian (%)		Ket.
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tingkat partisipasi perantau dalam pembangunan daerah di Nagari/Desa/Kel Bina Kerjasama Rantau	NA	NA	19	NA	17	NA	89,47	
2.	Kerjasama Pemerintah Daerah di bidang social budaya dan ekonomi	NA	2	3	2	3	100	100,00	
Rata-rata 2018								94.73	
Kriteria Penilaian		Sangat Berhasil							

* Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan

Untuk lebih jelasnya capaian sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bagian Rantau untuk tahun 2018 memiliki 4 buah kegiatan diantara sebagai berikut :

1. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi dalam rangka mengoptimalkan kontribusi perantau dalam mendukung program-program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diharapka para perantau dapat tergugah empati dan partisipasi perantau terhadap pembangunan di Ranah Minang yang nantinya diharapkan terwujud dalam bentuk Kesepakatan dan Kerjasama.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera barat memberikan informasi mengenai agenda pembangunan, potensi yang dimiliki serta kendala-kendala yang dihadapi pada bidang Sosial Budaya dan Ekonomi kepada perantau Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan agar terjalin sinergisitas dan kesepakatan anatar Pemerintah Daerah dengan perantau khususnya dalam mengoptimalkan sumber daya perantau untuk pembangunan ranah/nagari/desa/kelurahan di Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan atau rapat-rapat untuk *memaparkan potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat sehingga diharapkan nantiya perantau tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam* mengambangkan semua potensi yang di ikat dengan Nota Kesepahaman

Kerjasama. Dalam pelaksanaannya tersebut dilakukan di beberapa Provinsi di Indonesia dengan mengumpulkan para perantau. Adapaun pada Tahun 2018 pelaksanaan kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Provinsi Riau pada tanggal 6 Mei 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru. Materi yang di sampaikan dari Pemerintah Provinsi adalah Potensi dan Peluang Kerjasama di Bidang Pangan dan Potensi dan Peluang Kerjasama di Bidang Peternakan
- b. Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2018 di Emersia Hotel dan Resort Lampung. Materi yang disampaikan dar 4 OPD yaitu :
 - Potensi dan Peluang Kerjasama di Bidang Perkebunan
 - Potensi dan Peluang Kerjasama di Bidang Peternakan
 - Potensi dan Peluang Kerjasama di Bidang Pariwisata
 - Potensi dan Peluang Kerjasama di Bidang Perikanan
- c. Provinsi Makassar pada tanggal 15 November 2018 di Hotel Singgasana Makassar. Materi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera tentang Sektor Pangan, Peternakan dan Produk Unggulan Daerah. Daerah Yang menyajikan produk unggulan adalah Kota Pariaman dan Kota Payakumbuh.
- d. Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 November 2018 di Hotel Balairung Jakarta. Materi yang disampaikan tentang Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Ormas Minang dan Pengusaha Rumah Makan/Hotel/Tour and Travel yang berasal dari Sumatera Barat se Jabodetabek.

Untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 360.886.728, dengan serapan sebesar Rp. 355.432.167 atau 98,49%.

2. Pendataan Perantau Minang di Nagari/Kelurahan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi
Perantau Minang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Agar memperoleh data Perantau minang yang akurat perlu dilakukan pendataan oleh Pemerintah Nagari atau Kelurahan yang di fasilitasi oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya data perantau tersebut diharapkan para perantau akan dapat mendukung program pembangunan di daerah dengan cara berpartisipasi dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah. Adapun data perantau yang diperoleh selama tahun 2018 sebagai berikut :

DATA PERANTAU MINANG

1. PERANTAU MINANG DI LAMPUNG

No	NAMA	ORGANISASI	ALAMAT	NO .HP/WA
1.	Zukarnain	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	082183249985
2.	Ardiansyah	Gebu Minang Lampung	Bandar lampung	082162893228
3.	Afridam Adam Sikumbang	KBSB Prov.	Bandar Lampung	08127973224
4.	H M.Ferry	KKPS	Bandar lampung	
5.	Ferynia	Gebu Minang Lampung		0811725922

6.	Gusfidnil,DVM	Gebu Minang Lampung	Ruko Tavp no.11-12 Tangggerang Selatan	0818414907
7.	Dismiyarti	Gebu Minang Lampung	Jl: Ujung Karakatau no.5 Tl. Betung	082185217326
8.	Mc. Ramli Sikumbang	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	082181130270
9.	Beni Hendriyanto	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	082176265964
10.	Hj. Herawati.SE.MM	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	081369213769
11.	Hj.Siti Aminah Sepahit Lidah	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	08127917505
12.	Hj. Elida Syarif	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	08127955678
13.	Adila Dachlan	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	081272665155
14.	Yusnaini Koerdi	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	082185064999
15.	Hj. Azimah M.Pd	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	081272272883
16.	Hj. Eliya Saleh. M M	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	0811725431
17.	Hj. Hasmilawati (Mila)	Gebu Minang Lampung	Gk Ladies	081367001355
18.	Indra Krisna	OJK Prov Lampung		08117912707
19.	Riyan	Korwil IPPSA		082178904923
20.	Haris Seswitra	Gebu Minang Lampung		085835697030
21.	Iqbal Haris	Gebu Minang Lampung		081272169567
22.	H. Abdul Azib Zami	Gebu Minang Lampung		0811723519
23.	Richi Aprian	Gebu Minang Lampung		081213392333
24.	Arpen Rustam	Gebu Minang Lampug		081272962760
25.	Oktovia Hafid	Gebu Minang Lampung		082181155285
26.	Sharial Sakfar	Gebu Minang Lampung		081379816000
27.	Badar Rohim .S Pd	Gebu Minang Lampung		085273933472
28.	Adif Prano	Gebu Minang Lampung		089631473014
29.	Firmansyah	Gebu Minang Lampung		082175985782
30.	Novellia yulistine	Gebu Minang Lampung		085368681001
31.	Afrina Putri Antika	Gebu Minang Lampung		
32.	Detty Ochi Seruna	Gebu Minang Lampung		

33.	Rima Tama Tat a Sejati	Gebu Minang Lampung		
34.	Renaldy Saputra	Gebu Minang Lampung		
35.	Andeska Pratama	Gebu Minang Lampung		
36.	Lusiana	Gebu Minang Lampung		081279818845
37.	Nurdini Putri	Gebu Minang Lampung		08137770369
38.	Hi Fuad	Gebu Minang Lampung		081377843616
39.	Edi Erika Kahar	Gebu Minang Lampung		0811724502
40.	Herman Hosen	Gebu Minang Lampung		081272839302
41.	Muswir	Gebu Minang Lampung		0811728607
42.	Mansurdin	Gebu Minang Lampung		081369126086
43.	Nasrizal Jalinus	Gebu Minang Lampung	Kota Serpong Bandar lampung	08127915118
44.	H Dasril St Bagindo	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	082185591419
45.	Firdausil AB	Gebu Minang Lampung		081261276020
46.	Drs.H Zainal Iskandar	Gebu Minang Lampung	Padang Ratu No. 1	08154056785
47.	Miming Zainal Iskandar	Gebu Minang Lampung		0821255154
48.	Harni	Gebu Minang Lampung		081279413963
49.	Bajawati Yusuf	Gebu Minang Lampung		081272285339
50.	Erwin Saragosa	Gebu Minang Lampung		085263881965
51.	Eka Meliadiani	Gebu Minang Lampung		082280899993
52.	Eni Melyani	Gebu Minang Lampung		082177092901
53.	Mulyadi	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	081379194784
54.	Elframli	Gebu Minang Lampung	Bandar lampung	08127903402
55.	Amiruddin	Gebu Minang Lampung	Bandar lampung	085379753000
56.	Rudy Candra Satya	Gebu Minang Lampung	Bandar lampung	081373042000
57.	Emi Remiles	Gebu Minang Lampung	Padang Kemiling Bandar Lampung	081279557565
58.	Beni Hendriyanto	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	082176265964
59.	Ridwan	Gebu Minang Lampung	Bandar Lampung	08127979328

60.	Defi Andri	Gebu Minang Lampung	Bakauhuni	081369639000
61.	Mulyadi Bugi	Gebu Minang Lampung	bakauhuni	081379672236
62.	Hj. Yarisma	Gebu Minang Lampung	Lampung	0811790355
63.	Citra Persada	Gebu Minang Lampung	Jl. Way Besar Panoman	0811722708
64.	Tuti Rina Roza	Gebu Minang Lampung	Sukabumi	082185049588
65.	Murniati	Gebu Minang Lampung	Teluk Betung	082182032940
66.	Ila Karmila	Gebu Minang Lampung	Sukarame	081919910789
67.	Neneng Osni	Gebu Minang Lampung		08127972654
68.	Ovy Y	Gebu Minang Lampung		081272428884
69.	Nevo	Gebu Minang Lampung		
70.	Zainal Hakim	Gebu Minang Lampung		081279673308
71.	Amimardan	Gebu Minang Lampung		08117911964
72.	Hidayat	Gebu Minang Lampung		082306076586
73.	Hermanyah	Gebu Minang Lampung		081369737577
74.	Dita Rifky K	Gebu Minang Lampung		
75.	Ary keke Banurea	Gebu Minang Lampung		
76.	Hanifah KH	Gebu Minang Lampung		
77.	Nia Veronika	Gebu Minang Lampung		
78.	M Yose Rizal	Gebu Minang Lampung		
79.	Ayu Mai Asyara	Gebu Minang Lampung		
80.	Ali Imron	Gebu Minang Lampung		
81.	Hj Kartini AB	Gebu Minang Lampung		
82.	Srie Ramli	Gebu Minang Lampung		
83.	Drs. H. A. Cholid Balan	Gebu Minang Lampung		
84.	Dismiyarti	Gebu Minang Lampung		
85.	Latifah Hasanah	Gebu Minang Lampung		
86.	Ratna Ms	Gebu Minang Lampung		
87.		Gebu Minang Lampung		

2. Daftar : PERANTAU MINANG DI MAKASAR

No	NAMA	ORGANISASI/Jabatan	ALAMAT	NO .HP/WA
1.	Hj. Gusnimar	IKWAS / Pembina		081219235614
2.	Yurneli	IKWAS / Pembina		081342051305
3.	Nova	IKWAS / Pembina		085263739082
4.	Romi Oktafianto	IKM Sapayuang/ Sekjen		085285748993
5.	Yulia Edrizal	IKWAS		081355305832
6.	Netri Fadlan	IKWAS		085215967045
7.	Ermiyati	IKWAS	Makasar	081241377770
8.	Rafnis	IKM Sapayuang	Makasar	0813466361949
9.	Desrizal	IKM Sapayuang	Makasar	0811449881
10.	Dra.Hj.ST.Khadijah	IKWAS	Makasar	081359745348
11.	Maly Roza	IKM Sapayuang	Makasar	081354990479
12.	Heru tandiwali	IKM Sapayuang	Makasar	082186691421
13.	Zulmainidar	IKWAS/Ketua	Makasar	081354759093
14.	Erman Tamimi	IKM Sapayuang	Makasar	
15.	Susyanti David	IKWAS	Makasar	081354844335
16.	Endi Moh.T	IKM Sapayuang/ Ketua	Makasar	081331642707
17.	Sari Sauki	IKWAS	Makasar	082291284321
18.	Taslim	Perantau asal Payakumbuh		081341175469
19.	Sauki	IKM Sapayuanng/ Ketua Umum	Makasar	082187116208
20.	Fitri Mansur	IKM Sapayuang /KetuaIII	Makasar	08122174810
21.	Hairoen	IKM Sapayuang / Ketua II	Makasar	08114612274
22.	Yetti Oktavia	IKM Clarisa 50 Kota		082390702353
23.	Elly Fanadi			082383864213
24.	Dewi Endriyani	IKM Songket		085271190818

25.	Sudarti	IKM Bordir dan Sulaman		085365967884
-----	---------	------------------------	--	--------------

Kegiatan Pendataan Perantau Minang di Nagari/Kelurahan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 18.312.600,- dan terealisasi sejumlah Rp. 18.312.600,- atau 100%

3. Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau

Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau untuk tahun 2018 melaksanakan 4 (empat) kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan di Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah kabupaten Kota dan Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama di Auditorium Gubernur Sumatera Barat.
- b. Mefasilitasi penyusunan dokumen master plan pemberdayaan potensi Nagari/Desa/Kelurahan, Pemerintah Provinsi serta Perantau Minang sesuai dengan potensi dan kewenangan yang dimiliki
- c. Penyusunan Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Profil Produk Unggulan Daerah di Nagari/Desa/Kelurahan Percontohan Binaan Kerjasama Rantau Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat.
- d. Pembahasan konsep rencana Pengembangan Pariwisata dan Produk Unggulan di nagari/Desa/Kelurahan Percontohan Binaan Kerjasama Rantau di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat.
- e. Melaksanakan pertemuan dengan perantau dalam rangka Sosialisasi Dokumen Perencanaan (Master plan/grand design/site plan/action plan) Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau di Jakarta di Hotel Balairung Jakarta.
- f. Sosialisasi Dokumen Perencanaan Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau di Bali

Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau memperoleh anggaran sebesar Rp. 349.888.368 dan terealisasi sebesar Rp. 316.887.493,- atau 90,57%

4. Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang adalah agar terjalinnya komunikasi yang erat antara Pemerintah dengan Perantau sehingga sinergisitas ranah dan rantau didalam proses pembangunan di Sumatera Barat dapat tercipta. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara perantau dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui diskusi interaktif ataupun menghadiri undangan yang diminta oleh perantau. Selama tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Provinsi Lampung, Sabtu 17 Februari 2018 acara dilaksanakan di Hotel Harison Badar Lampung dalam rangka Pengukuhan Pengurus Gebu Minang Provinsi Lampung
- b. Provinsi Bali, Rabu 24 Februari 2018 acara dilaksanakan di Sekretariat IKM Bali dalam rangka Pengukuhan Pengurus IKMS Bali Periode 2018 – 2023

- c. Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu 17 Maret 2018 acara dilaksanakan di Hotel Hilton Batam dalam rangka silaturahmi dengan IKSB Batam
- d. Provinsi Riau, Minggu 25 Maret 2018 acara dilaksanakan di Sekretariat PKDP Riau dalam rangka Pengukuhan Pengurus PKDP Riau
- e. Provinsi Banten, Minggu 22 Juli 2018 acara dilaksanakan di Hotel Mercure Serpong dalam rangka Silaturahmi dengan Perantau asal Dharmasraya
- f. Provinsi Gorontalo, Sabtu 8 September 2018 acara dilaksanakan di Aula Kantor Perbendaharaan Negara Gorontalo dalam rangka Silaturahmi dengan Perantau Minang di Gorontalo

Kegiatan Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang memperoleh anggaran sebesar Rp. 185.162.590 dengan serapan sebesar Rp. 179.337.832 atau 96,85 %

c. **PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Pencapaian kinerja pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

Hampir di seluruh Kabupaten/Kota tidak mempunyai pejabat struktural untuk menangani perantau dan keterbatasan SDM di Kabupaten/Kota dan tidak tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan.

Regulasi yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan rantau juga belum memadai.

1. Pembangunan aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE) bersamaan dengan pelaksanaan tugas monev pembangunan yang mesti dengan aplikasi yang baru dibangun (build by running). Oleh sebab itu proses pembangunan aplikasi menjadi terdesak dan perlu di upgrade secara simultan sepanjang tahun sesuai kendala yang dihadapi.
2. Aplikasi SBE jauh berbeda dari Simbangda sebelumnya dimana SBE menghendaki evidence dan proses validasi, sementara simbangda sebelumnya tidak
3. Website biro yang lama sudah dinon aktifkan sementara wibesite baru, baru akan dibangun di tahun 2018 dan menjadi target yang harus diselesaikan di tahun 2018
4. Kapasitas Server kurang memadai dan pengelolaan server tergantung kepada Bappeda karena server berada di Bappeda
5. Basis data aplikasi Pemprov Sumbar tidak satu sehingga sulit menyediakan aplikasi SBE yang mudah diakses
6. SKPD belum terbiasa untuk berkoordinasi dengan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sehingga pengendalian permasalahan kegiatan masih terpencar-pencar di beberapa SKPD
7. Pendanaan yang masih kurang khususnya dalam mendukung koordinasi kegiatan baik dalam rapat koordinasi.
8. Sebanyak 146 rekomendasi luar negeri yang dikeluarkan bagi OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih banyak yang belum menyampaikan laporan perjalanan dinas ke

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Sekretariat Negara RI

9. Belum tersedianya SDM yang cukup dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi yang mana kewenangan tersebut meliputi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

d. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dapat disampaikan antara lain :

1. Pengisian jabatan struktural dan Penambahan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan melalui BKD.
2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor melalui APBD Tahun 2018.
3. Menyarankan agar Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pejabat yang khusus menangani rantau minimal setingkat eselon IV serta pengusulan anggaran untuk mendukung kegiatannya.
4. Membuat regulasi serta SOP yang jelas untuk kegiatan kerjasama, pembangunan dan rantau.

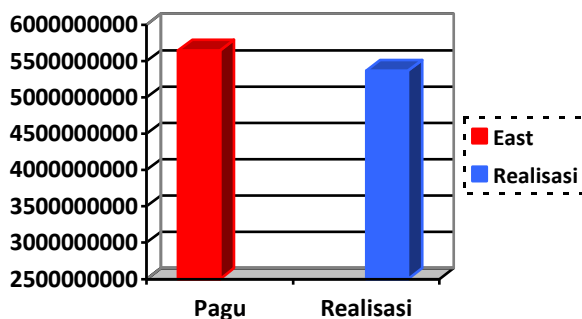
D. REALISASI ANGGARAN

Dari sisi dukungan alokasi anggaran untuk mencapai kinerja pada tahun 2018 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp.5.646.962.054,- dapat teralisasi sebesar Rp.5.365.839.979,- atau 95,02 % untuk membiayai program/kegiatan, seperti dapat dilihat pada tabel 3.8. dan gambar 3.1.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2018

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	751,575,434.00	733,459,186	94,13	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	56,119,434	52,987,704	94,42	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6,000,000	4,164,960	69,42	100
3	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	112,800,000	101,375,000	89,87	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	27,500,000	27,403,200	99,65	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,000,000	29,992,750	99,98	100
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	477,200,000	475,579,572	99,65	100
7	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	14,500,000	14,500,000	100	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	27,456,000	27,456,000	100	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	708,300,000	680,994,988	83,97	100
1	Pengadaan meubeleur	350,000,000	344,400,000	98,4	100
2	Pengadaan komputer dan jaringan komputer	260,000,000	258,150,000	99,29	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	61,500,000	47,744,988	77,63	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	11,000,000	4,900,000	44,55	100
5	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Aset OPD	25,800,000	25,800,000	100	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23,312,800	19,543,074	83,83	100
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23,312,800	19,543,074	83,83	100
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,353,000.00	94,445,300	93,07	100
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	17,669,000	15,693,300	88,82	100
2	Penatausahaan keuangan SKPD	70,000,000	70,000,000	100	100
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,684,000	8,752,000	90,38	100
V	Program Pengembangan Data dan Informasi	205,022,372	197,579,399	96,37	100
	Pemanfaatan dan pengelolaan website kerjasama rantau	205,022,372	197,579,399	96,37	100
VI	Program Kerjasama Pembangunan	3,138,166,441.00	2,925,697,597	88,63	100
	Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan perantau minang di bidang sosial budaya dan ekonomi	360,886,728	355,432,167	98,49	100
	Pendataan perantau minang di nagari/kelurahan	18,312,600	18,312,600	100	100
	Pembentukan dan pembinaan nagari/kelurahan binaan kerjasama rantau	349,888,368	316,887,493	90,57	100
	Peningkatan jaringan komunikasi pemerintah daerah dengan perantau minang	185,162,590	179,337,832	96,85	100
	Pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah	351,677,425	248,441,365	70,64	100
	Kerjasama luar negeri	142,497,400	133,427,260	93,63	100
	Kerjasama pihak ketiga	148,158,000	133,520,208	90,12	100
	Kerjasama antar provinsi	90,555,870	78,828,402	87,05	100
	Kerjasama pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota	90,618,818	84,834,911	93,62	100
	Kerjasama Pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga	4,500,000	2,500,000	55,56	100
	Monitoring kerjasama dalam dan luar negeri	1,395,908,642	1,374,175,359	98,44	100
VII	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	723,232,007	714,120,435	98,74	100
	Koordinasi pengendalian evaluasi pembangunan	723,232,007	714,120,435	98,74	100
	TOTAL	5,646,962,054.00	5,365,839,979	95,02	100

Gambar 3.1
Realisasi Anggaran Tahun 2018



Anggaran Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tahun 2018 yang berjumlah Rp. 5.646.962.054,- dapat terealisasi sejumlah Rp. 5.365.839.979,- memiliki efisiensi anggaran dari kegiatan Belanja Modal atau Pengadaan yang dapat di rinci dengan uraian berdasarkan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi (%)		
					Fisik	Keuangan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.119.434,-	52.987.704,-	100	94,42	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	6.000.000,-	4.164.960	100	69,42	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran telepon hanya untuk 1 (satu) jaringan - Pembayaran TV kabel dimulai pada bulan Juli 2018 - Kelebihan anggaran sebesar Rp. 1.835.040,- 					
		3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.800.000,-	101.375.000	100	89,87	
		Harga pembelian barang dibawah harga DPA, sehingga efisiensi sebesar Rp. 11.425.000,-					
		4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.500.000,-	27.403.200,-	100	99,65	
		Dapat terealisasi semuanya karena sangat dibutuhkan untuk kegiatan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang baru terbentuk					

		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,-	29.992.750,-	100	99,98
		6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	477.200.000,-	475.579.572,-	100	99,66
		7. Penyedia Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	14.500.000,-	14.500.000,-	100	100,00
		8. Penyediaan Makanan dan Minuman	27.456.000,-	27.456.000,-	100	100,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Mebeleur	350.000.000,-	344.400.000,-	100	98,40
		Efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.600.000,-				
		2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	260.000.000,-	258.150.000,-	100	99,29
		Efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.850.000,-				
		3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	61.500.000,-	47.744.988,-	100	77,63
		Kendaraan Dinas BA 1425 B masih dalam keadaan layak, jadi servis kendaraan belum diperlukan.				
		4. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	4.900.000,-	100	44,55
		Karena sebagian besar komputer di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau adalah komputer pengadaan di tahun 2017 dan 2018, sehingga kondisi komputer masih baik.				
		5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	25.800.000,-	25.800.000,-	100	100,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.312.800,-	19.543.074,-	100	83,83
		Efisiensi Anggaran				

4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	17.669.000,-	15.693.300,-	100	88,82	
		Efisiensi Anggaran					
		2. Penatausahaan Keuangan SKPD	70.000.000,-	70.000.000,-	100	100,00	
		3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.684.000,-	8.752.000	100	90,38	
5.	Program Pengembangan Data dan Informasi	1. Pemanfaatan dan Pengelolaan Website Kerjasama Rantau	205.022.372,-	197.579.399,-	100	96,37	
6.	Program Kerjasama Pembangunan	1. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi	360.886.728,-	355.432.167,-	100	98,49	
		2. Pendataan Perantau Minang di Nagari/ Kelurahan	18.312.600	18.312.600	100	100,00	
		3. Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau	349.888.368,-	316.887.493,-	100	90,57	
		4. Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang	185.162.590,-	179.337.832,-	100	96,85	
		5. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	351.677.425,-	269.725.365,-	100	70,64	
		Hal ini disebabkan :					
		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SM dalam melaksanakan kegiatan - Tidak banyak permintaan fasilitasi kerjasama daerah baik itu kerjasama daerah/provinsi dengan provinsi lain maupun kerjasama provinsi dengan kabupaten/kota 					

		6. Kerjasama Luar Negeri	142.497.400,-	105.993.260,-	100	93,63
		7. Kerjasama Pihak Ketiga	148.158.000,-	133.520.208,-	100	90,12
		8. Kerjasama Antar Provinsi	90.555.870,-	78.828.402,-	100	87,05
		9. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota	90.681.818,-	84.834.911,-	100	93,62
		10. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga	4.500.000,-	2.500.000,-	100	55,56
		Tidak banyak permintaan fasilitas kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian/Lembaga dalam periode November s.d Desember 2018				
		11. Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	1.395.908.642,-	1.374.175.359,-	100	98,44
7.	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemda	1. Koordinasi Pengendalian Evaluasi Pembangunan	723.232.007	714.120.435	100	98,74
JUMLAH			5.646.962.054	5.365.839.979	100	95,02

Dari anggaran Tahun 2018 yang berjumlah Rp. 5.646.962.054,- terdapat efisiensi sebesar Rp. 36.887.262,- atau sebesar 0,65% dari anggaran yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2018. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah, pembangunan dan rantau, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2018 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Dari sisi ketersediaan sasaran strategis dan indikator kinerja yang terukur, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja berdasarkan hasil rekomendasi capaian tahun sebelumnya.
2. Capaian kinerja keuangan masih baik yaitu dengan realisasi penyerapan anggaran APBD pada tahun 2018 sebesar 95,02 % atau Rp. 5.365.839.979,- dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 5.646.962.054,-

B. Permasalahan dan Kendala

Pencapaian kinerja pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau menunjukkan perkembangan yang baik dan lebih meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

1. Bagian Rantau
 - a. Hampir di seluruh Kabupaten/Kota tidak mempunyai pejabat struktural untuk menangani perantau dan keterbatasan SDM di Kabupaten/Kota dan tidak tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan.
 - b. Regulasi yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan rantau juga belum memadai.
2. Bagian Pembangunan
 - a. Pembangunan aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE) bersamaan dengan pelaksanaan tugas monev pembangunan yang mesti dengan aplikasi yang baru dibangun (build by running). Oleh sebab itu proses pembangunan aplikasi menjadi

terdesak dan perlu di upgrade secara simultan sepanjang tahun sesuai kendala yang dihadapi.

- b. Aplikasi SBE jauh berbeda dari Simbangda sebelumnya dimana SBE menghendaki evidence dan proses validasi, sementara simbangda sebelumnya tidak
 - c. Website biro yang lama sudah dinon aktifkan sementara wibesite baru, baru akan dibangun di tahun 2018 dan menjadi target yang harus diselesaikan di tahun 2018
 - d. Kapasitas Server kurang memadai dan pengelolaan server tergantung kepada Bappeda karena server berada di Bappeda
 - e. Basis data aplikasi Pemprov Sumbar tidak satu sehingga sulit menyediakan aplikasi SBE yang mudah diakses
 - f. SKPD belum terbiasa untuk berkoordinasi dengan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sehingga pengendalian permasalahan kegiatan masih terpencar-pencar di beberapa SKPD
 - g. Pendanaan yang masih kurang khususnya dalam mendukung koordinasi kegiatan baik dalam rapat koordinasi.
3. Bagian Kerjasama Antar Daerah
- a. Sebanyak 146 rekomendasi luar negeri yang dikeluarkan bagi OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih banyak yang belum menyampaikan laporan perjalanan dinas ke Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Sekretariat Negara RI
 - b. Belum tersedianya SDM yang cukup dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi yang mana kewenangan tersebut meliputi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

C. Rekomendasi

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah :

1. Penambahan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan melalui BKD.
2. Melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kegiatan.
3. Menyarankan agar Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pejabat yang khusus menangani rantau minimal setingkat eselon IV serta pengusulan anggaran untuk mendukung kegiatannya.
4. Membuat regulasi serta SOP yang jelas untuk kegiatan kerjasama, pembangunan dan rantau

